



**POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH RAWAT
DAERAH ALIRAN SUNGAI (SEKARDADU)
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Oleh

Puji Erliana febriyanti

NIM 200910201024

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM SUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JEMBER
2024**



**POLA KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH RAWAT
DAERAH ALIRAN SUNGAI (SEKARDADU)
DI KABUPATEN BANYUWANGI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial

SKRIPSI

Oleh

Puji Erliana Febriyanti

NIM 200910201024

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JEMBER
2024**

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Rasa terima kasih untuk orang-orang yang telah memberikan semangat dan doanya kepada penulis, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Siti Jamilah dan Bapak Sukadi telah merawat, menyayangi dan mendidik selama ini dan tidak akan pernah tergantikan.
2. Kepada seluruh keluarga besar saya yang telah mendukung dan memberikan doanya selama ini.
3. Kedua dosen pembimbing saya, bapak Dr. Suji S.Sos., M.Si dan ibu Dr. Dina Suryawati S.Sos., M.A.P yang telah membimbing saya selama mengerjakan skripsi.
4. Seluruh guru yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada saya mulai dari menempuh pendidikan di SDN 1 Sarimulyo, SMPN 2 Cluring, SMAN 1 Gambiran serta seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
5. Seluruh teman-teman Administrasi Negara Angkatan 2020, terlebih sahabat penulis Wahyu Febby yang selalu setia menemani penulis.
6. Seluruh informan dalam penelitian ini khususnya kepada pegawai Dinas Pengairan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Cipta Karya, Dinas Pertanian dan Pangan, serta Dinas Perikanan.
7. Almamater tercinta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

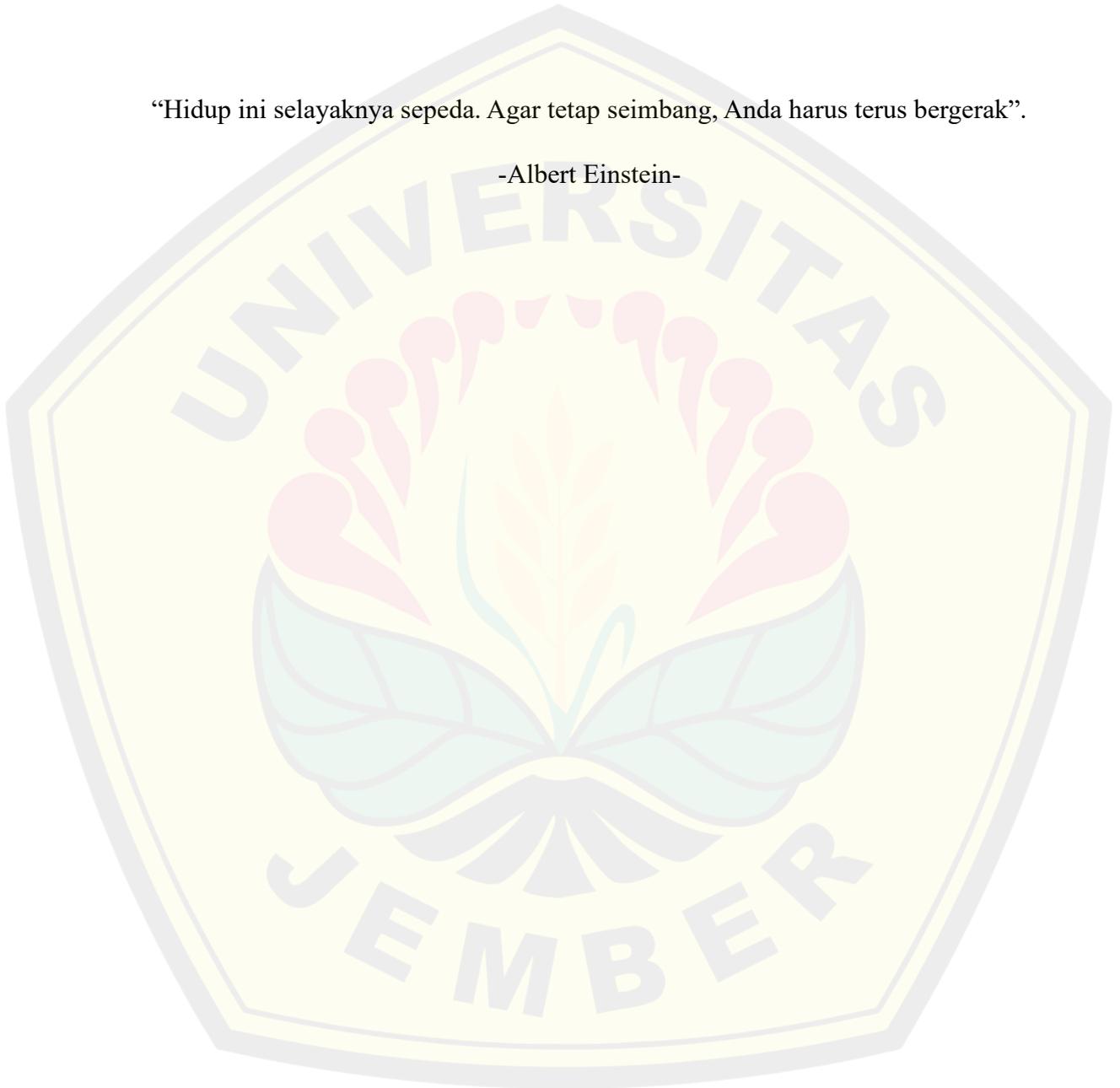
MOTTO

“Anda mungkin bisa menunda, tapi waktu tidak akan menunggu”.

-Benjamin Franklin-

“Hidup ini selayaknya sepeda. Agar tetap seimbang, Anda harus terus bergerak”.

-Albert Einstein-



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Puji Erliana Febriyanti

NIM : 200910201024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: *Pola Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu) di Kabupaten Banyuwangi.*

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Juni 2024

Yang Menyatakan,

Puji Erliana Febriyanti

NIM 200910201024

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul *Pola Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu) di Kabupaten Banyuwangi* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 25 Juni 2024

Tempat : Ruang Sidang Lantai 2 FISIP Universitas Jember

Pembimbing

Tanda Tangan

1. Pembimbing Utama

Nama : Dr. Suji, S.Sos., M.Si (.....)

NIP : 197006152008121002

2. Pembimbing Anggota

Nama : Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.A.P (.....)

NIP : 198009172005012001

Penguji

1. Penguji Utama

Nama : Drs. Anwar, M.Si (.....)

NIP : 196306061988021001

2. Penguji Anggota

Nama : Hermanto Rohman, S.Sos, MPA (.....)

NIP : 197903032005011001

ABSTRACT

The Banyuwangi Regency Irrigation Office has created a service innovation program called the Watershed Care School (Sekardadu). With this program, it is expected to produce change agents (cadres) who can educate their environment to care about the preservation of water resources. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. Then as a guideline or basis for research, researchers use the theory of Coordination by Hasibuan (2011). The data and information needed in this study were collected using a combined triangulation technique (interviews, observations, and documentation) and analyzed using data analysis techniques from Miles, Huberman, and Saldana (2014). The results showed that based on the Coordination Pattern of the Local Government in the Implementation of the Sekardadu Program in Banyuwangi Regency, it has been carried out quite well when analyzed using the Coordination theory by Hasibuan (2011) which describes that there are 2 types of coordination and 4 factors that influence the coordination patterns of each actor involved in the implementation of the program. In vertical coordination, the role carried out by the executive agency, namely the Banyuwangi Regent and the ranks of regional apparatus organizations, has been running properly. Then in horizontal coordination, coordination between public officials, namely between local government organizations in cooperation, runs well according to their roles and functions. In the Unity of Action factor, the implementors show that they have a sense of trust in each other which is supported by open communication, integrity (honesty), and have good self-competence values. In addition, the implementers also show good perceptions or assumptions and preferences. Then the communication factor between the implementers shows the intensity of good regularity in the frequency of communication from day to day. In addition, the realization of a cooperative relationship established with several parties both formally and informally. Meanwhile, the cumulative pattern between program implementers and educational institutions does not seem to have a significant influence on program development. Then on the division of labor factor, the Sekardadu program already has staff/employees who are in accordance with the required capabilities, already has a Standard Operating Procedure regarding job description information, already has adequate facilities, the budget for the Sekardadu program comes from the Banyuwangi Regency APBD, and does not affect other regional development policies. However, the allocation has not run smoothly because it is still constrained by the absence of a special budget related to consumption. On the discipline factor, the behavior of program implementors shows good results. Therefore, the Water Agency itself must include a monitoring agenda once a month to educational institutions. In addition, program implementers must also discuss the preparation of SPJ for participants' consumption, then immediately make a proposal to submit a consumption budget to the Regent.

Keywords: Public Policy, Coordination, Cooperation, Policy Implementation, SEKARDADU

RINGKASAN

Pola Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu) di Kabupaten Banyuwangi: Puji Erliana Febriyanti, 200910201024, 2024, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pola Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu) di Kabupaten Banyuwangi. Ada beberapa alasan mengapa program ini tercipta, seperti kondisi sungai-sungai di Kabupaten Banyuwangi sering kali tercemar oleh limbah industri, pertanian, dan domestik, ruang sempadan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, serta belum termanfaatkannya air sungai atau saluran atau embung secara maksimal. Sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas air yang dapat mencemari Daerah Aliran Sungai (DAS). Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian sumber daya air tersebut menjadi masalah yang mengakibatkan terganggunya kualitas air di Daerah Aliran Sungai.

Dengan permasalahan tersebut, Dinas Pengairan Kabupaten Banyuwangi berusaha mengatasinya dengan menciptakan sebuah program inovasi pelayanan yang diberi nama Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu). Program Sekardadu ini mulai diterapkan pada Maret 2022 lalu bebarengan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Banyuwangi No.188/33/KEP/429.011/2022 Tentang tim koordinasi kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sekolah rawat daerah aliran sungai di Kabupaten Banyuwangi. Program inovasi ini diinisiasi oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, dan dilaksanakan oleh 6 Dinas sebagai implementor dengan Dinas PU Pengairan sebagai *leading* sektor. Dengan adanya program ini diharapkan dapat mencetak *agent of change* (kader) yang dapat mengedukasi lingkungannya untuk peduli terhadap kelestarian sumber daya air.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif deskriptif. Dasar dalam penelitian, peneliti menggunakan teori koordinasi oleh Hasibuan (2011). Untuk data dan informasi dikumpulkan dengan menggunakan teknik triangulasi gabungan (wawancara, observasi, dan dokumentasi) dan analisa menggunakan teknik analisis data dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Pola Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Sekardadu di Kabupaten Banyuwangi sudah terlaksana cukup baik jika dianalisis menggunakan teori koordinasi oleh Hasibuan (2011) yang mejabarkan bahwa ada 2 Tipe Koordinasi dan 4 faktor pendukung. Pada koordinasi secara vertical, peran yang dilakukan oleh kepala eksekutif daerah yakni Bupati banyuwangi serta jajaran organisasi pemerintah daerah sudah berjalan dengan semestinya. Kemudian pada koordinasi secara horizontal, koordinasi antar pejabat publik yakni antara organisasi pemerintah daerah dalam kerja sama berjalan dengan baik sesuai dengan peran dan fungsinya. Pada faktor Kesatuan Tindakan,

Para implementor menunjukkan saling memiliki rasa kepercayaan dan integritas (kejujuran), serta memiliki nilai kompetensi diri yang baik. Selain itu para implementor juga menunjukkan persepsi atau anggapan dan juga preferensi yang baik dalam pelaksanaan Sekardadu. Kemudian pada faktor Komunikasi antar implementor menunjukkan intensitas keteraturan yang baik pada frekuensi komunikasi dari hari ke hari, terwujudnya hubungan kerja sama baik secara formal maupun informal, Namun pada pola kumulatif antar implementor program dengan lembaga pendidikan terlihat belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan program. Kemudian pada faktor pembagian kerja, sudah memiliki staf/pegawai yang sesuai dengan kapabilitas yang dibutuhkan, sudah memiliki Standart Operating Procedure mengenai informasi *job description*, sudah disediakan fasilitas yang memadai, Untuk anggaran program Sekardadu berasal dari APBD Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan yang tercantum dalam Surat keputusan Bupati Banyuwangi serta tidak mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah lainnya. Namun dalam pengalokasiannya terkendala dengan belum adanya anggaran khusus terkait konsumsi. Pada faktor disiplin, perilaku implementor program menunjukkan hasil yang baik.



PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pola Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu) di Kabupaten Banyuwangi.” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada;

1. Dr. Djoko Poernomo, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.A.P. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
4. Dr. Suji, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan, wawasan, waktu dalam membimbing penulisan skripsi ini.
5. Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.A.P. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan wawasan, waktu dan pengarahan dalam membimbing penulisan skripsi ini.
6. Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang

telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan bantuan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan.

8. Bapak Mulyono selaku operator Program Ilmu Administrasi negara
9. Seluruh orang-orang yang telah bersedia membantu dan mendukung penulis mulai dari kuliah hingga menulis skripsi ini sampai selesai.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan hingga skripsi ini selesai. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Jember, 25 Juni 2024

Penulis,

Puji Erliana Febriyanti

NIM 200910201024

DAFTAR ISI

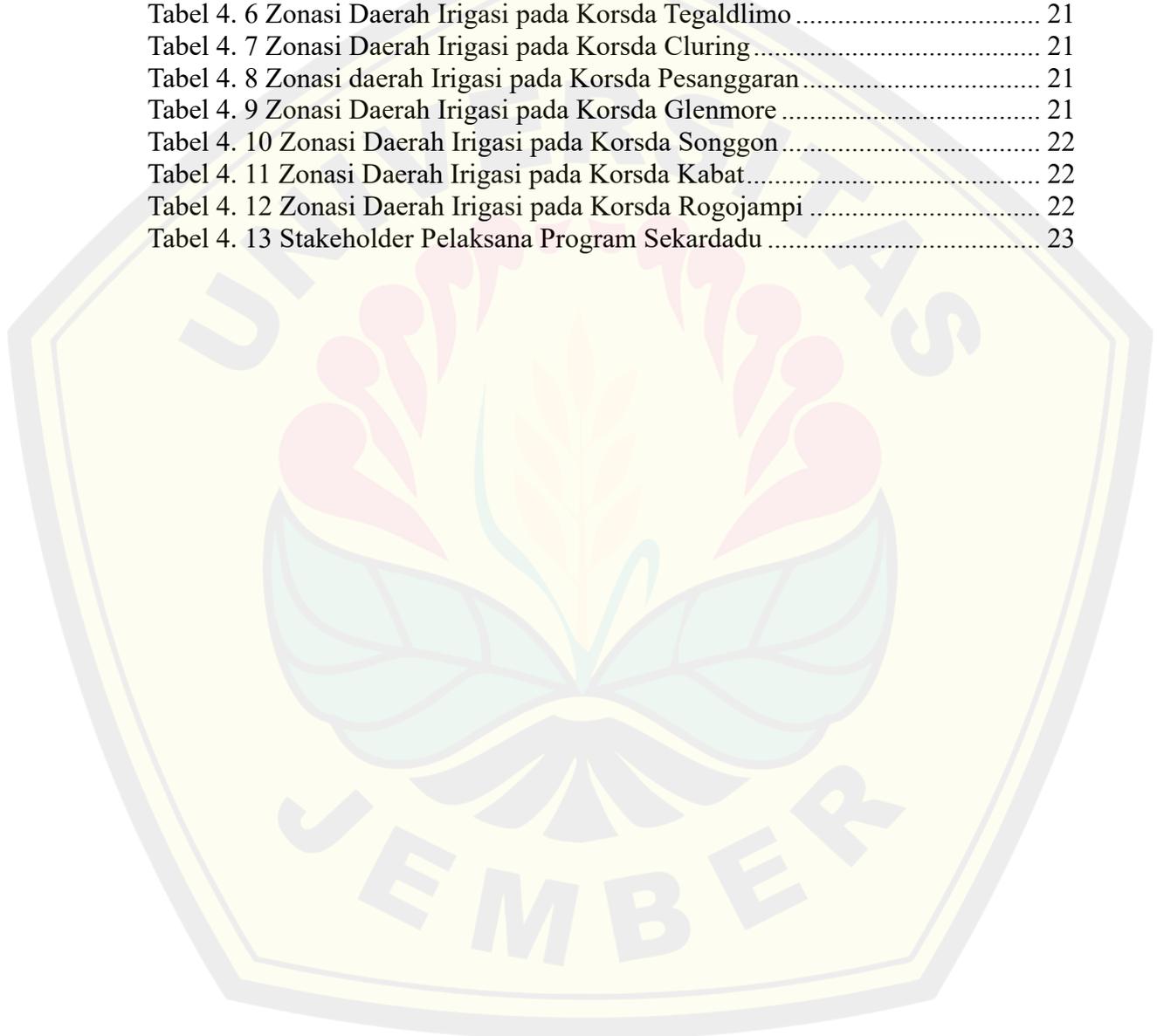
HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
ABSTRACT	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Kebijakan Publik.....	5
2.2 Pola Koordinasi	6
2.2.1 Konsep Pola	6
2.2.2 Konsep Koordinasi.....	6
2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi.....	7
2.3 Program Sekardadu	8
2.4 Kerangka Konseptual	9
2.5 Penelitian Terdahulu	10
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	11
3.1 Pendekatan Penelitian.....	11
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	11
3.3 Objek dan Fokus Penelitian	12
3.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	12
3.5 Informasi Penelitian	12
3.6 Keabsahan Data.....	13
3.7 Teknik Analisis Data.....	14
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	15
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	15
4.1.1 Profil Kabupaten Banyuwangi	15
4.1.2 Gambaran Umum Program Sekardadu	16
4.1.3 Gambaran Umum Aktor Pelaksana Program Sekardadu	23
4.2 Hasil Penelitian	25
4.3 Pembahasan	37
4.3.1 Koordinasi secara Vertical.....	37
4.3.2 Koordinasi secara Horizontal.....	38
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	45

5.1 Kesimpulan	45
5.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	49



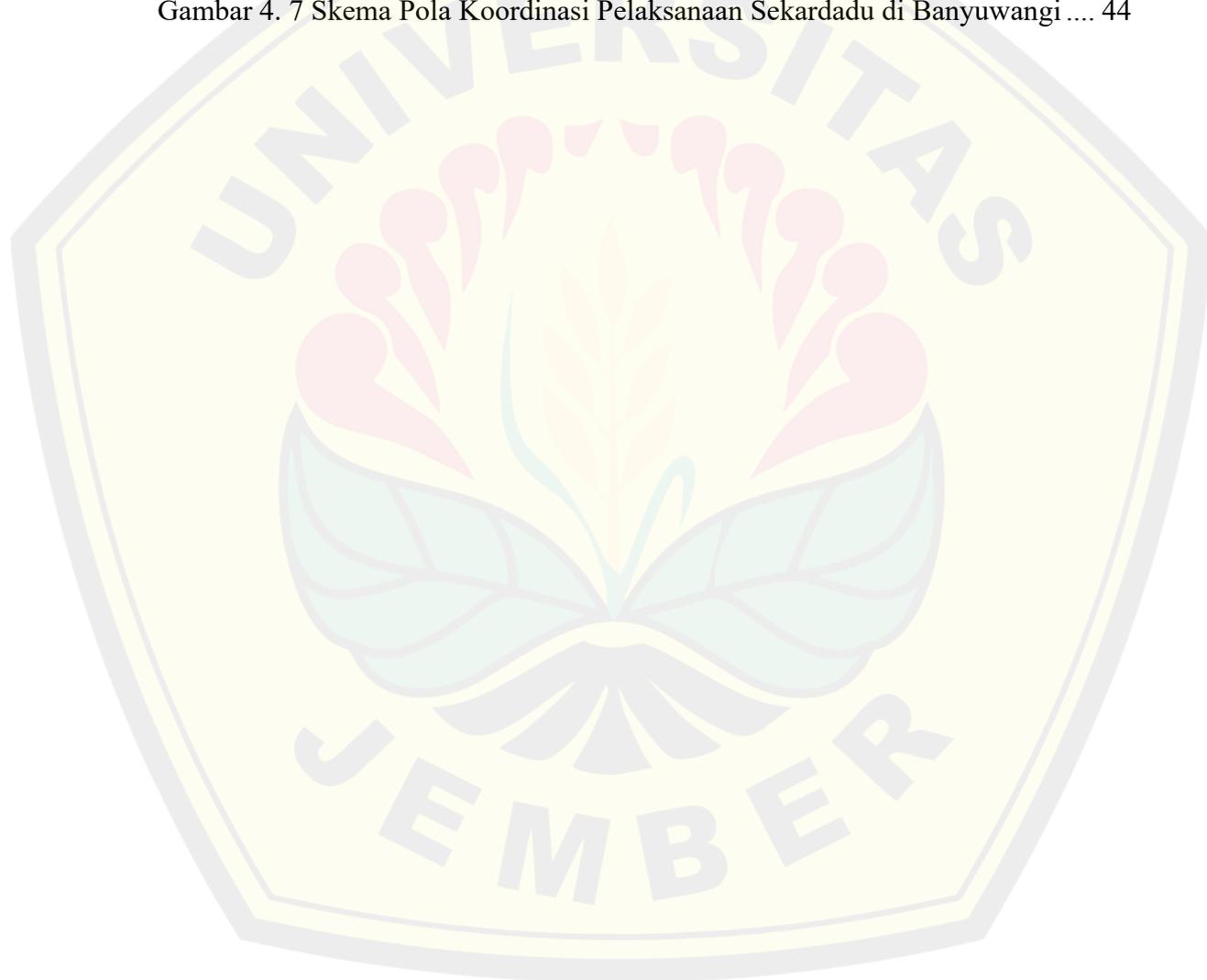
DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 4. 1 Susunan kegiatan pada program Sekardadu.....	16
Tabel 4. 2 Zonasi Daerah Irigasi pada Kordsa Bangorejo	17
Tabel 4. 3 Zonasi Daerah Irigasi pada Kordsa Banyuwangi.....	18
Tabel 4. 4 Zonasi Daerah Irigasi pada Kordsa Genteng.....	19
Tabel 4. 5 Zonasi Daerah Irigasi pada Kordsa Srono.....	20
Tabel 4. 6 Zonasi Daerah Irigasi pada Kordsa Tegaldlimo	21
Tabel 4. 7 Zonasi Daerah Irigasi pada Kordsa Cluring.....	21
Tabel 4. 8 Zonasi daerah Irigasi pada Kordsa Pesanggaran.....	21
Tabel 4. 9 Zonasi Daerah Irigasi pada Kordsa Glenmore	21
Tabel 4. 10 Zonasi Daerah Irigasi pada Kordsa Songgon.....	22
Tabel 4. 11 Zonasi Daerah Irigasi pada Kordsa Kabat.....	22
Tabel 4. 12 Zonasi Daerah Irigasi pada Kordsa Rogojampi	22
Tabel 4. 13 Stakeholder Pelaksana Program Sekardadu	23



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual.....	9
Gambar 4. 1 Alur Koordinasi Pelaksanaan Sekardadu	24
Gambar 4. 2 Peran Bupati, Organisasi Pemerintah Daerah, serta Kordsda	27
Gambar 4. 3 Pola Komunikasi antar Implementor.....	30
Gambar 4. 4 Standart Operating Procedure (SOP) Pelaksanaan Sekardadu.....	34
Gambar 4. 5 Interaksi antar Implementor Program Sekardadu.....	35
Gambar 4. 6 Fokus Fiskal pada Program Sekardadu	37
Gambar 4. 7 Koordinasi secara Vertical antar Implementor	38
Gambar 4. 8 Koordinasi secara Horizontal antar Implementor	39
Gambar 4. 7 Skema Pola Koordinasi Pelaksanaan Sekardadu di Banyuwangi	44



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pola Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu) di Kabupaten Banyuwangi. Menurut UU RI No. 32 tahun 2009 Bab 1 pasal 1 tentang Lingkungan hidup, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Manusia sebagai makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Adanya interaksi antara manusia dan lingkungannya ini, mengakibatkan adanya ketidakstabilan atau ketidakseimbangan ekologi seperti kerusakan tanah, pencemaran lingkungan dan sebagainya (Rahayu, 2015:5).

Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk sungai-sungai yang menjadi sumber air bagi masyarakat setempat. Sayangnya, kondisi sungai-sungai di Kabupaten Banyuwangi sering kali tercemar oleh limbah industri, pertanian, dan domestik, masih banyaknya sampah di sungai dan saluran air, ruang sempadan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya, serta belum termanfaatkannya air sungai atau saluran atau embung secara maksimal. Sehingga hal tersebut mengakibatkan menurunnya kualitas air yang dapat mencemari Daerah Aliran Sungai. Berdasarkan catatan Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 Volume sampah di Kabupaten Banyuwangi masih tinggi, yang mencapai 1.245 ton per hari yang didominasi sampah anorganik seperti halnya plastik. Dalam satu bulan misalnya, potensi sampah yang dihasilkan di Banyuwangi mencapai 37.360,89 ton. Dan satu tahun mencapai 448.330,70 ton. Dari total tersebut komposisi 45 persen berasal dari sampah plastik (Kompas, 4 Agustus 2022). Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kelestarian sumber daya air tersebut menjadi masalah yang mengakibatkan terganggunya kualitas air di Daerah Aliran Sungai.

Dengan adanya permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu) sejak Maret 2022 lalu bebarengan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Banyuwangi No.188/33/KEP/429.011/2022 Tentang tim koordinasi kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sekolah rawat daerah aliran sungai di Kabupaten Banyuwangi sebagai upaya menjaga daerah aliran sungai. Program inovasi ini diinisiasi oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, dalam pelaksanaannya Bupati Banyuwangi memberi mandat kepada 6 Dinas sebagai implementor dari Program Sekardadu. Mulai dari Dinas PU Pengairan, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan, Serta Dinas Perikanan. Pada tahun 2023 program ini melibatkan 174 SD, 75 SMP, 27 SMA, dan 9 kampus se-Banyuwangi untuk berpartisipasi dalam penerapan program Sekardadu.

Berdasarkan buku panduan program Sekardadu, Dinas PU Pengairan berperan sebagai *Leading* sektor serta koordinator, fasilitator, Pusat informasi, dan Pusat koordinasi pelaksanaan program Sekardadu. Dinas Pendidikan berkontribusi untuk membantu Memobilisasi lembaga pendidikan yang tergabung kedalam program ini. Dinas Pendidikan juga membantu Dinas Pengairan jika membutuhkan tenaga pendidik dalam melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Dinas Lingkungan Hidup berkontribusi pada kegiatan bersih-bersih sungai khususnya dalam permasalahan sampah, jika dari Dinas Pengairan membutuhkan bantuan terkait sampah maka dari DLH sendiri akan mengirimkan bantuan tenaga pegawai yang paham terkait permasalahan sampah. Dinas PU Cipta Karya berkontribusi untuk menyalurkan bantuan terkait bibit tanaman jika ada kegiatan untuk melakukan penanaman pohon. Dinas Perikanan berkontribusi dalam hal penyediaan bibit ikan jika diadakannya kegiatan penebaran bibit ikan di sungai. Dinas Pertanian dan Pangan juga berkontribusi membantu untuk mensosialisasikan terkait tanaman holtikultura pada saat sosialisasi berlangsung sebagai salah satu kegiatan dalam Sekardadu ini.

Namun, demikian karena program Sekardadu ini masih merupakan program baru di Kabupaten Banyuwangi sehingga masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, Dinas PU pengairan selaku *leading* program merasa

kesulitan dalam hal penyusun SPJ (surat pertanggung jawaban), untuk melaksanakan program dibutuhkan SPJ sedangkan peserta yang terlibat dalam program ini adalah dari para pelajar sehingga bentuk SPJ-nya berupa tanda tangan/absensi. Untuk itu Dinas PU Pengairan sendiri merasa kesulitan dalam penganggaran/pendanaan karena belum adanya SPJ terkait konsumsi peserta pelatihan tersebut. Untuk memberikan pelatihan atau sosialisasi juga membutuhkan anggaran untuk pemberian konsumsi kepada peserta, khususnya kepada siswa atau mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam menerapkan program sekardadu. Dalam segi pendanaan belum ada anggaran khusus terkait konsumsi untuk peserta pelatihan Sekardadu yang akhirnya untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan Sekardadu ini masih berada di masing-masing OPD yang terlibat. Selain itu, beberapa dari siswa atau mahasiswa selaku (kader) yang tergabung ke dalam pelaksanaan program ini juga belum optimal, didapati memiliki komitmen yang rendah dalam melaksanakan program Sekardadu, sebab belum adanya aturan atau SOP tentang monitoring secara berkelanjutan ke lembaga-lembaga pendidikan setelah selesainya kegiatan. Karena untuk pelaksanaan program sekardadu ini juga butuh kesadaran diri masing-masing pihak yang terlibat agar program ini bisa tetap berjalan sesuai dengan tujuan awal terbentuknya program tersebut. Sehingga pada akhirnya kesulitan-kesulitan tersebut dapat menyebabkan kurangnya perencanaan yang efektif dalam pelaksanaan program sekardadu yang berkelanjutan sesuai dengan tujuan awal terbentuknya program sekardadu ini yakni untuk mencetak *agent of change* (kader) yang dapat mengedukasi lingkungannya untuk peduli terhadap kelestarian sumber daya air. Dalam fenomena tersebut, diperlukan adanya pola koordinasi antara pemerintah dengan implementor yang terlibat agar tercipta keselarasan dalam pelaksanaan program Sekardadu. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian yang dapat menganalisis tentang;

"Pola Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu) di Kabupaten Banyuwangi"

Berdasarkan konsepnya, peneliti menggunakan teori koordinasi yang dikemukakan oleh Hasibuan (2011) untuk menganalisis pola koordinasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program sekardadu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pola Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu) di Kabupaten Banyuwangi ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pola Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu) di Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana pola koordinasi antar organisasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program sekardadu serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap literatur program studi Ilmu Administrasi Negara.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau kontribusi pemikiran bagi penelitian selanjutnya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan sebuah informasi untuk mendukung analisis suatu penelitian yang terdiri dari konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diteliti, serta kerangka berpikir peneliti dalam mengembangkan konsep-konsep yang akan dijadikan landasan dalam penelitian. Berikut merupakan konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik
2. Pola Koordinasi
3. Program Sekardadu
4. Kerangka Konseptual
5. Penelitian Terdahulu

2.1 Kebijakan Publik

Menurut Said Zainal Abidin (2004: 23) Pengertian kebijakan publik adalah sesuatu yang tidak bersifat sempit dan spesifik. Akan tetapi, justru bersifat strategis dan luas. Oleh karena itu, kebijakan publik memiliki fungsi sebagai sebuah pedoman umum kebijakan. Serta memiliki keputusan khusus di bawahnya. Sedangkan menurut David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2020:15) kebijakan publik merupakan suatu keputusan politik yang dilakukan dan dikembangkan oleh instansi dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas politik seperti para pajabat eksekutif, legeslatif, hakim dan pejabat lainnya. Anderson (1930:3) juga mengutarakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan adanya maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor terkait dengan suatu hal yang menjadi perhatian atau suatu masalah.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas politik untuk memutuskan suatu hal terkait yang menjadi perhatian atau permasalahan yang ada dengan maksud dan tujuan tertentu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep teori koordinasi oleh Hasibuan (2011) yang dianggap tepat dalam menganalisis tentang pola koordinasi antar organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam pelaksanaan program Sekardadu. Karena dengan teori ini peneliti dapat melihat pola koordinasi masing-masing aktor yang saling berkepentingan satu dengan yang lainnya.

2.2 Pola Koordinasi

2.2.1 Konsep Pola

Menurut Soerjono Sukanto (1993:315), kata pola (pattern) adalah standarisasi, pengulangan, organisasi atau arah dari perilaku. Sedangkan menurut Aryono Suyono (1985:327) pola dapat diartikan sebagai suatu rangkaian unsur-unsur yang sudah mantap mengenai suatu gejala, dan dapat dipakai sebagai contoh dalam menggambarkan atau mendeskripsikan gejala itu sendiri. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pola adalah sebuah sistem kerja yang digunakan dalam menggambarkan suatu fenomena tertentu.

2.2.2 Konsep Koordinasi

Konsep koordinasi terdapat banyak definisi menurut para ahli. Mulyasa (2011:131) mengemukakan bahwa koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha kerjasama antara badan/instansi. Sedangkan Awaluddin dalam Hasibuan (2011:86) menguraikan bahwa koordinasi diartikan sebagai Suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Demikian pula menurut Ndraha (2011:290) dijelaskan bahwa koordinasi adalah mengkomunikasikan bersama berbagai kegiatan yang berbeda-beda sehingga semua kegiatan terarah pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sehingga pencapaiannya tidak merusak keberhasilan yang lain. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha kerja sama antar badan, instansi, atau unit tertentu yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Secara lebih lengkap Hasibuan (2011) menjelaskan bahwa pada koordinasi terdiri atas dua tipe koordinasi yaitu :

- a. Koordinasi secara vertikal (*vertical coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tegasnya atasan mengkoordinasikan semua anggota yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung.
- b. Koordinasi secara horizontal (*horizontal coordination*) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat.

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut mengenai koordinasi peneliti menggunakan konsep teori koordinasi yang dikemukakan oleh Hasibuan (2011) untuk menganalisis tentang Pola koordinasi pada pelaksanaan program Sekardadu. Sehingga peneliti dapat mengetahui peran masing-masing aktor yang terlibat kedalam program tersebut.

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Koordinasi

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan (2011:88) sebagai berikut :

1. Kesatuan Tindakan, Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri.
2. Komunikasi, Merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Dalam organisasi komunikasi sangat penting karena dengan komunikasi partisipasi anggota akan semakin tinggi dan pimpinan memberitahukan tugas kepada karyawan harus dengan komunikasi.
3. Pembagian Kerja, Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya sendiri. Kelompok dua atau lebih orang yang berkeja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan

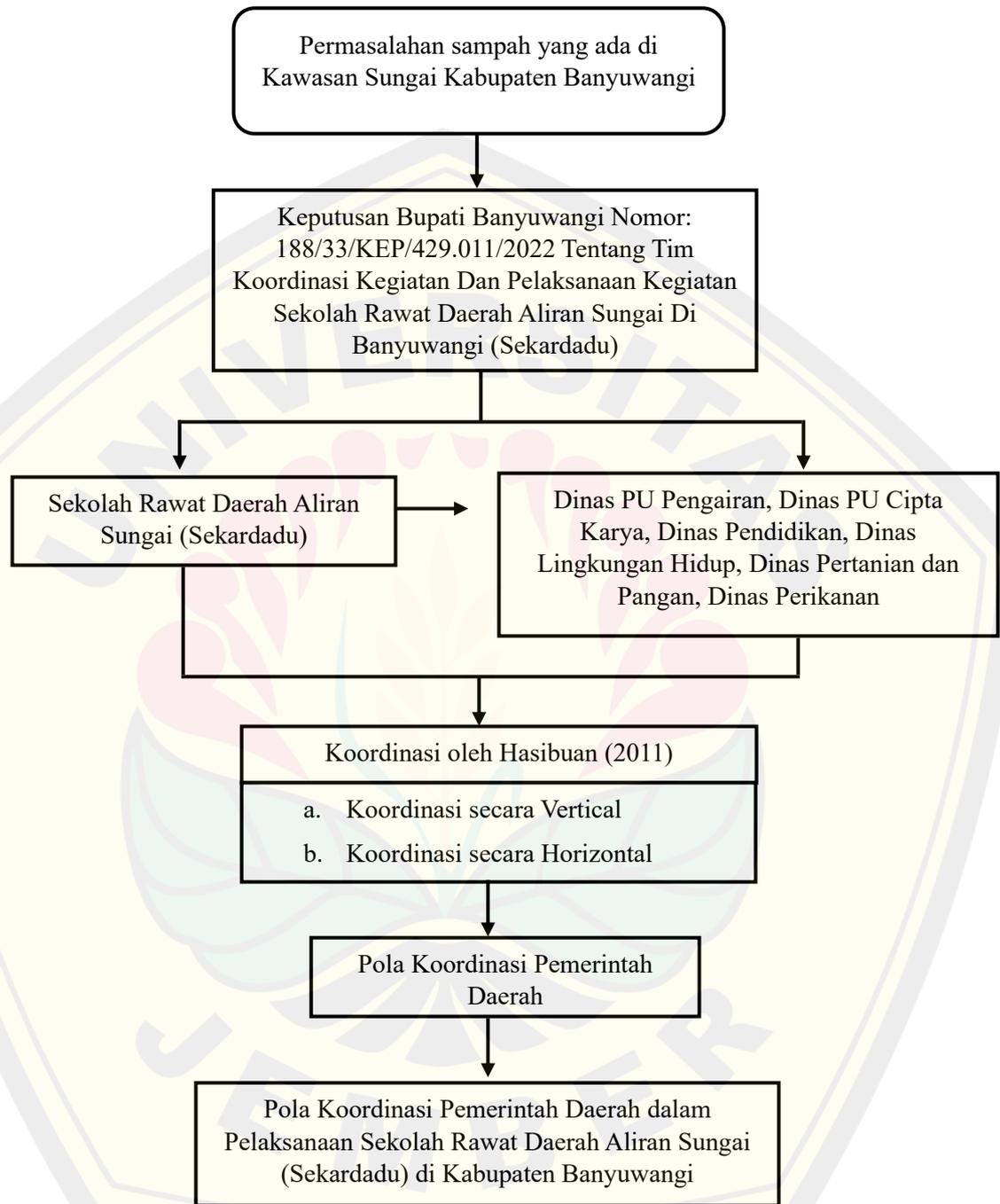
perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (*Division of labor*).

4. Disiplin, Setiap organisasi yang kompleks, setiap bagian harus bekerja secara terkoordinasi, agar masing-masing dapat menghasilkan hasil yang diharapkan. Koordinasi adalah usaha penyesuaian bagian-bagian yang berbeda-beda agar kegiatan dari pada bagian-bagian itu selesai pada waktunya, sehingga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluruhan, untuk itu diperlukan disiplin.

2.3 Program Sekardadu

Sesuai dengan Keputusan Bupati No.188/33/KEP/429.011/2022 tentang tim koordinasi kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sekolah rawat daerah aliran sungai di Kabupaten Banyuwangi, Program Sekardadu (Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai) merupakan program lintas sektor mulai dari Dinas PU Pengairan, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Petanian dan Pangan, Serta Dinas Perikanan dengan melibatkan seluruh sekolah dan kampus yang kawasannya dialiri sungai. Program ini juga memberikan edukasi pada sekolah-sekolah mulai SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi untuk menjaga kebersihan sungai. Setidaknya, ada 174 SD, 75 SMP, 27 SMA, serta 9 perguruan tinggi yang aktif merawat Daerah Aliran Sungai (DAS) di kawasan sekitarnya. Para siswa mempelajari cara menjaga ekosistem sungai dan bagaimana masyarakat dapat bekerja sama untuk menjaga aliran sungai bersih dari sampah, khususnya sampah plastik. Memanfaatkan stren kali untuk destinasi wisata, memasang screenguard di sungai, membangun kolam ikan di sungai, dan penanaman pohon adalah beberapa program lainnya yang dilaksanakan oleh Sekardadu. Tujuan dari Program Sekardadu bukan hanya untuk menjaga sungai agar tetap bersih, tetapi juga untuk menumbuhkan agen perubahan yang akan merasa malu untuk membuang sampah ke sungai. Program ini juga mengajarkan masyarakat untuk berkolaborasi dengan meningkatkan kepedulian dalam merawat daerah aliran sungai, sehingga akan menumbuhkan keharmonisan dan rasa tanggung jawab di semua sektor dan menjadi lebih peduli terhadap keberlanjutan lingkungan.

2.4 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Sumber: diolah oleh peneliti

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Penulis	Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Pola Koordinasi dan Komunikasi Pemerintah Kecamatan Metro Barat dalam Penertiban Administrasi Kelurahan Mulyojati Tahun 2022	Yuditya Wardhana dan Rivaldo Indra Zen	2023	Kualitatif Deskriptif	Pola koordinasi mengenai masalah penertiban administrasi kelurahan sudah cukup baik, dengan adanya keterlibatan pejabat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, adanya bentuk kesepakatan yang dihasilkan semua pelayanan administrasi harus mengikuti SOP yang ada dan juga adanya usulan dari peserta koordinasi jika koordinasinya melibatkan semua kelurahan.
Perbedaan	Penelitian oleh Yuditya dan Rivaldo berfokus pada proses Penertiban Administrasi Kelurahan Mulyojati, serta lokasi penelitian terletak di Kecamatan Metro barat. Sedangkan riset peneliti berfokus pada proses pelaksanaan program Sekardadu, dan berlokasi di Kabupaten Banyuwangi.			
Pola koordinasi dalam Pengelolaan Program Tabungan Sosial Anak (TASA) (Studi pada Dinas Sosial Provinsi Lampung)	Wiwik sukatmi shuhrotul aminin	2019	Kualitatif Deskriptif	Pola koordinasi dalam mewujudkan pengelolaan program TASA yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung, LKSA Bussaina dan BNI Tanjung Karang telah berjalan dengan baik, karena masing-masing lembaga memiliki kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama meski terkendala dengan identitas anak balita terlantar yang belum memiliki identitas resmi. Serta adanya perbedaan jarak geografis.
Perbedaan	Penelitian oleh Wiwik sukatmi berfokus pada proses pengelolaan program tabungan sosial anak di Provinsi Lampung, Sedangkan riset peneliti berfokus pada proses pelaksanaan program Sekardadu di Kabupaten Banyuwangi.			
Koordinasi Pemerintahan dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah	Asri B dan Adee Fatahilah	2019	Kualitatif Deskriptif	Koordinasi yang dilakukan instansi terkait dalam pendataan penduduk rentan di Kota Palu sudah dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Masih adanya ego sektoral antar instansi menimbulkan hambatan dalam kordinasi yang dilakukan dalam pendataan. Belum adanya sarana dan prasarana serta Sosialisasi juga belum maksimal.
Perbedaan	Penelitian oleh Asri B dan Adee Fatahilah memilih lokasi penelitian di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah dengan fokus penelitian Pemerintahan dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan, Sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Banyuwangi dengan fokus penelitian pelaksanaan program Sekardadu.			

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan suatu metode pelaksanaan penelitian untuk menganalisis suatu permasalahan tertentu sehingga mendapatkan informasi yang digunakan sebagai solusi atas permasalahan yang ada. Tujuannya yakni sebagai dasar dalam usaha memperoleh data yang faktual, lengkap, serta dapat dipertanggung jawabkan.

3.1 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, dan mengkonstruksi fenomena. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk menggambarkan secara faktual mengenai Pola Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu) di Kabupaten Banyuwangi.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian merupakan unsur penting dalam penelitian untuk mendapatkan informasi. Peneliti menentukan lokasi penelitian di Kantor Dinas PU Pengairan, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan, Serta Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat atau lokasi penelitian ini. Enam dinas tersebut dijadikan tempat penelitian karena dinas-dinas tersebut merupakan *Stakeholder* yang ikut serta bekerja sama dalam pelaksanaan program sekardadu ini, sehingga peneliti ingin mengetahui peran masing-masing dinas yang terkait. Rentang waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah bulan Desember 2023-Februari 2024.

3.3 Objek dan Fokus Penelitian

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, permasalahan penelitian dapat dikaji dengan sangat luas. Maka dalam penelitian ini, peneliti membatasi penelitiannya dengan satu atau lebih dari satu aspek. Kondisi tersebut dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus penelitian. Fokus penelitian dalam pendekatan kualitatif berisi tentang pokok permasalahan yang masih bersifat umum. Dengan demikian, peneliti dalam penelitian ini menetapkan obyek penelitian yakni Program Sekardadu, Sedangkan fokus penelitiannya yaitu Pola Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu) di Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan konsep Teori koordinasi oleh Hasibuan (2011).

3.4 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang strategis dalam suatu penelitian. Hal tersebut dikarenakan inti dari suatu penelitian adalah mendapatkan atau memperoleh data atau informasi. Menurut Sugiyono (2016) dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya yaitu: observasi, wawancara, studi dokumen, dan triangulasi (gabungan). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif dengan jenis partisipatif pasif (peneliti datang ke tempat informan atau narasumber, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan yang dilakukan), wawancara, serta studi dokumen untuk memperoleh data dari sumber data yang sama yang dilakukan secara serempak. Peneliti menggunakan teknik triangulasi gabungan yang mencakup berbagai macam teknik yang berbeda untuk memperoleh data atau informasi dari narasumber. Berikut adalah alat yang digunakan dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini: a) Handphone sebagai alat perekam dan dokumentasi, b) Buku catatan, dan c) Pedoman wawancara.

3.5 Informasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan informan dengan dua teknik, yakni menggunakan teknik *purposive* dilanjut dengan teknik *snowball*. *Purposive* menurut Heryan (2021) adalah memilih kasus yang informatif berdasarkan strategi

dan tujuan yang telah ditetapkan peneliti dan jumlahnya tergantung pada tujuan serta sumber daya studi. Peneliti memilih beberapa orang yang memenuhi kriteria sebagai informan yakni sebagai berikut: 1) Sub Koordinator Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi, 2) Sub Koordinator Pengelolaan Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi, 3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Cipta Karya Kabupaten Banyuwangi, 4) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan untuk *snowball* menurut Sugiyono (2008) merupakan teknik pengambilan data yang pada awalnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan jika informan utama belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka solusinya adalah mencari orang lain sebagai sumber data. Dalam hal ini peneliti memilih informan dari pegawai/Staf fungsional pengelolaan sumber daya air Dinas pengairan, Staf bidang SD, dan SMP Dinas pendidikan, Staf tenaga ahli bidang IT Dinas Perikanan, serta Staf dari tim unit pelaksana teknis (Korsda).

3.6 Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti dalam pengambilan data menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam hal ini sumber data primer didapat dari hasil wawancara dengan informan yang telah ditetapkan oleh peneliti. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data atau informasi yang didapat dari dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan masalah penelitian. Uji keabsahan data menurut Sugiyono (2016) merupakan tahap yang digunakan untuk menguji apakah data yang telah didapatkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, faktual, serta objektif. Dalam uji keabsahan data peneliti menggunakan uji kredibilitas sebagai teknik untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini. Dalam uji kredibilitas penelitian, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti peneliti mengecek kembali kebenaran informasi yang didapat dari satu informan dengan informan lainnya.

3.7 Teknik Analisis Data

Bagian ini merupakan tahap akhir metode penelitian. Moleong (2012) menjelaskan bahwa proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari berbagai sumber: (wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapang, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya), Serta dari teknik atau cara yang digunakan sebagai pembanding dalam mendapatkan informasi dari wawancara yang kemudian dicocokkan dengan informasi dari hasil observasi. Hasil dari telaah terhadap seluruh data kemudian menjadi rujukan bagi peneliti untuk dapat melakukan proses reduksi data.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teori model interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: a) kondensasi data (*data condensation*) yakni proses dalam menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip; b) menyajikan data (*data display*) yakni gabungan informasi sistematis yang memberi kemungkinan adanya suatu penarikan kesimpulan; c) menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*) yakni menyimpulkan seluruh data sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan yang kemudian akan diuji kebenaran dan keakuratannya.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Pada bab 4 kali ini, peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian tentang Pola Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu) di Kabupaten Banyuwangi. Penyajian serta analisis data hasil dari penelitian menggunakan metode yang digagas oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014).

4.1.1 Profil Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 letak geografis Kabupaten Banyuwangi berada di ujung timur pulau jawa dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, Sebelah Barat dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember, Sebelah Timur dengan Selat Bali, dan Sebelah Selatan dengan Samudra Hindia. Berada pada koordinat $7^{\circ}43' - 8^{\circ}46'$ LS dan $113^{\circ}53' - 114^{\circ}38'$ BT. Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah 5.782,50 Km² yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi memiliki 25 Kecamatan dan 217 desa atau kelurahan. Dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Tegaldlimo yaitu sekitar 1.341,12 km², sedangkan Kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Kecamatan Giri, dengan luas 21,31 km². Kecamatan Banyuwangi yang sebagai tempat pusat pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi memiliki luas 30,13 km². Pada pertengahan tahun 2023 jumlah penduduk di kabupaten Banyuwangi mencapai 1.769,239 jiwa. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 08 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah disebutkan bahwa Daerah Irigasi (DI) merupakan kewenangan Kabupaten dengan luas 30.287 (tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh tujuh) hektar meliputi 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) Daerah Irigasi, yang mana dalam pengembangannya DI terbagi menjadi 3 jenis Jaringan Irigasi yakni Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya. Sedangkan, Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang

terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap. Berdasarkan catatan Dinas PU Pengairan pada tahun 2022 Di Kabupaten Banyuwangi tercatat ada 390 daerah irigasi, Sehingga disamping dapat mengairi hamparan sawah yang sangat luas juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan tanah.

4.1.2 Gambaran Umum Program Sekardadu

Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai adalah sebuah program inisiasi yang dikeluarkan oleh bupati Banyuwangi yakni ibu Ipuk Fiestiandani, dan dilaksanakan oleh Dinas PU Pengairan, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan, Serta Dinas Perikanan. Pada tahun 2023 program ini melibatkan 174 SD, 75 SMP, 27 SMA, dan 9 kampus se-Banyuwangi yang melibatkan partisipasi aktif siswa-siswi sekolah dalam kegiatan konservasi yang mendukung dalam menjaga kelestarian sumber daya air dilingkungannya. Berdasarkan buku panduan program Sekardadu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah membuat dan mengimplementasikan Program Sekardadu dengan 4 prioritas sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Susunan kegiatan pada program Sekardadu

1.	Promotif (sosialisasi)	Membuat Majalah dinding tentang konservasi sumber daya air, Membuat Poster Ajakan untuk peduli kelestarian sumber daya air, Membuat acara yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian pada kelestarian sumber daya air, Melaksanakan kegiatan yang mengedukasi masyarakat untuk peduli kelestarian sumber daya air, dan Fasilitasi Lembaga Pendidikan untuk ikut melaksanakan kegiatan Sekardadu.
2.	Preventif (Pencegahan)	Membuat peraturan tertulis yang bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya air, Memasukan pembelajaran tentang kepedulian untuk menjaga kelestarian sumber daya air, serta Mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk membuat peraturan yang bertujuan menjaga kelestarian sumber daya air.
3.	Kuratif (Perbaikan)	Membersihkan sempadan sungai dan saluran yang ada di lingkungan, Membersihkan sungai dan saluran yang ada di lingkungan, dan Membuat kegiatan yang

	bertujuan untuk memperbaiki daerah aliran sungai yang rusak, seperti membersihkan sungai, penataan sempadan menjadi Ruang terbuka hijau (RTH) dan sebagainya.
4. Rehabilitatif (Perawatan)	Penanaman bibit pohon, Sarana-prasarana pendukung untuk menjaga kebersihan sungai dan saluran, <i>Screen barrier</i> di sungai atau saluran di sekitarnya, Membuat <i>vertical garden</i> , serta Melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah dan dikirimkan ke TPS3R di lingkungannya.

Sumber: Buku Panduan Program Sekardadu 2023

Selain itu, untuk mempermudah dalam menjangkau pelaksanaan program dibuat sebuah zonasi saluran irigasi yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaannya kegiatan Sekardadu. Total ada 281 daerah irigasi (DI) yang terbagi kedalam beberapa kecamatan dengan 11 zonasi wilayah yang dikelola oleh masing-masing Kordsa dengan jangkauan panjang saluran masing-masing lembaga pendidikan yakni mulai dari SD sepanjang 34.800 M, SMP 22.500 M, dan SMA 13.500 M. Beberapa zonasi pada daerah irigasi dalam pelaksanaan kegiatan pada program Sekardadu dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Zonasi Daerah Irigasi pada Kordsa Bangorejo

Kecamatan	Nama Saluran Irigasi	Lembaga Pendidikan
Bangorejo	Bga 4 Ka	MI AL JAZARI
Bangorejo	Tersier Tro Te	MI MIFTAHUL HUDA
Bangorejo	Sekunder Blu 1	SDN 1 BANGOREJO
Bangorejo	Sekunder Sambimulyo	SDN 1 SAMBIMULYO
Bangorejo	Tersier Tro Te	SDN 1 TEMUREJO
Bangorejo	Bga 5 Ka	SDN 10 TEMUREJO
Bangorejo	Sekunder Sambimulyo	SDN 2 SAMBIMULYO
Bangorejo	Sekunder Bangorejo	SDN 3 BANGOREJO
Bangorejo	Bbu 7 Ka	SDN 3 KEBONDALEM
Bangorejo	Sekunder Sambimulyo	SDN 3 SAMBIMULYO
Bangorejo	Bgo 3 Ka	SDN 3 SAMBIREJO
Bangorejo	Sekunder Pwo	SDN 3 TEMUREJO
Bangorejo	Bbu 10 Ka	SDN 4 BANGOREJO
Bangorejo	Sekunder Sambimulyo	SDN 4 SAMBIMULYO
Bangorejo	Sekunder Bangorejo	SDN 6 KEBONDALEM
Purwoharjo	Primer Sidoarjo	MI NU SIDOREJO
Purwoharjo	Blu 2 Ki 1	MI NU 2 PURWOHARJO
Purwoharjo	Sekunder Sidorejo	SDN 1 SIDOREJO
Purwoharjo	Sungai	SDN 2 BULUREJO
Purwoharjo	Sekunder Wringinpitu	SDN 2 SIDOREJO
Purwoharjo	Tersier tmo Ka	SDN 3 BULUREJO
Purwoharjo	Pwo 4 Ka Hilir	SDN 3 SIDOREJO
Purwoharjo	Tersier Tro Te	SDN 4 BULUREJO
Purwoharjo	Pwo 4 Ka	SDN KARETAN
Purwoharjo	Sekunder Ngadirejo	SDN 5 BULUREJO
Siliragung	Blu 2 Ki 1	SDN 1 BARREJO
Tegalsari	Tersier Bro	SD DARUSSALAM
Tegalsari	Tersier Bro	SDN 1 KARANGMULYO

Kecamatan	Nama Saluran Irigasi	Lembaga Pendidikan
Tegalsari	Sekunder Sambimulyo	SDN 1 SAMBIMULYO
Tegalsari	Bbu 2	SDN 2 KARANGDORO
Tegalsari	Tersier Bbu 5	SDN 2 KARANGMULYO
Tegalsari	Sekunder Sambimulyo	SDN 3 SAMBIMULYO
Bangorejo	Sekunder Sambimulyo	SMK NUSANTARA
Bangorejo	Sekunder Blu 1	SMK SUNAN AMPEL
Tegalsari	Sekunder Bro 1	MA DARUSSALAM
Tegalsari	Tersier Bro 3	MAS UNGGULAN MAMBA AL HUDA
Tegalsari	Sekunder Bro	SMK DARUSSALAM
Bangorejo	Sekunder Sambimulyo	MTSN 2 BANYUWANGI
Bangorejo	Tersier Blu 1 Ka	SMP SUNAN AMPEL
Bangorejo	Sekunder Bulurejo	SMPN 2 BANGOREJO
Bangorejo	Bga 4 Ka	SMPN 3 BANGOREJO
Purwoharjo	Primer Sidorejo	MTSN 7 BANYUWANGI
Purwoharjo	Sekunder Pwo	SMP KATOLIK SANTO AGUSTINUS
Purwoharjo	Sekunder Blu 2	SMP PP DARUL FALAH
Purwoharjo	Sungai	SMPN 2 PURWOHARJO
Tegaldlimo	Kali Pait	SMP PGRI 17 TEGALDLIMO
Tegalsari	Tersier Bro	MTS GARUSSALAM
Tegalsari	Tersier Bro	SMP DARUSSALAM
Tegalsari	Tersier Bro 3	SMP MUHKAR SYAFAAT
Tegalsari	Bbu 4	SMPN 2 TEGALSARI

Sumber: Buku Panduan Program Sekardadu 2023

Tabel 4. 3 Zonasi Daerah Irigasi pada Kordsa Banyuwangi

Kecamatan	Nama Saluran Irigasi	Lembaga Pendidikan
Glagah	Pakem	SD 2 PASPAN
Glagah	Astinyar	SDN 1 BANJARSARI
Glagah	Mustopo	SDN 1 PASPAN
Glagah	Gontoran	SDN 2 REJOSARI
Glagah	Telun Jeruk	SD NEGERI OLEHSARI
Glagah	Gontoran	SDN 1 REJOSARI
Glagah	Astinyar	SDN GLAGAH
Glagah	Pakem	SDN KENJO
Giri		SDN 1 GROGOL
Glagah	Secawan	SMK ALAWIYAH
Banyuwangi	Kali Klampok	SMP AL IRSYAD BANYUWANGI
Banyuwangi	Cetruk	SMP MUHAMADIYAH 3 BANYUWANGI
Banyuwangi	Cungking	SMPN 1 BANYUWANGI
Banyuwangi	Cetruk	SMPN 4 BANYUWANGI
Giri	Tekik	SMP ISLAM AL QOMAR
Giri	Tekik	SMPN 1 GIRI
Glagah	Waru	MTS SA ALAWIYAH
Glagah	Tekik	SMPN 1 GLAGAH
Glagah	Astiyar	SMPN 2 GLAGAH
Glagah	Pakem	SPM UNGGULAN HIDAYATUN NAJAH
Kalipuro	Bulusan	SMPN 2 KALIPURO
Wongsorejo	Curahuser	SMP IBRAHIMY WONGSOREJO
Wongsorejo	Kramasan	SMPN 1 WONGSOREJO
Kalipuro		SMPN 1 KALIPURO
Giri		SMAN 1 GIRI

Sumber: Buku Panduan Program Sekardadu 2023

Tabel 4. 4 Zonasi Daerah Irigasi pada Kordsa Genteng

Kecamatan	Nama Saluran Irigasi	Lembaga Pendidikan
Gambiran	Tersier K.A 7	PONDOK PESANTREN DARUL AMIN
Genteng	Primer Kg 1	PONDOK PESANTREN KEBUNREJO
Srono	Sekunder dan Sumberjeding	PONDOK AL FALAH
Cluring	Pa4	PONPES AL KAUTSAR
Cluring	Tersier Dam Muncul	SDN 1 TAMANAGUNG
Cluring	Tersier Dam Taman Agung Kanan	SDN 2 TAMANAGUNG
Cluring	Tersier Dam Manungkuli	SDN 3 CLURING
Gambiran	Tersier Dam Paras	SDN 7 CLURING
Gambiran	Saluran Dam Jangkung	MI HASYIM ASYARI
Gambiran	Tersier Dam Cokol	MI HIDAYATUL ULUM
Gambiran	Tersier W4 Kanan	SDN 1 WRINGINREJO
Gambiran	Tersier Dam Slamet	SDN 2 WRINGINREJO
Gambiran	Tersier Dam Slamet	SDN 4 WRINGINREJO
Gambiran	Saluran Pol Gambiran	SDN 2 GAMBIRAN
Gambiran	Sekunder K.A5	SDN 1 WRINGINAGUNG
Gambiran		SDN 1 YOSOMULYO
Gambiran	Saluran Tersier G.O 2	SDN 2 WRINGINAGUNG
Gambiran	Saluran Dam Jangkung	SDN 4 GAMBIRAN
Gambiran	Sekunder K.A 3	SDN 4 YOSOMULYO
Genteng	Tersier Kg 1	MI AL IKHSAN CANGAAN
Genteng		SD ALETHEA
Genteng	Tersier Kg	SD KATOLIK GENTANG
Genteng	S1	SD MUHAMADIYAH 6 GENTENG
Genteng	S2	SD TABITA PURI
Genteng	Tersier S2	SDI AL HUDA
Genteng	Tersier B. Pa 1	SDN 2 KEMBIRITAN
Genteng	Tersier B. Pa 1	SDN 6 KEMBIRITAN
Genteng	Tersier B. Pa 1	SDN 8 KEMBIRITAN
Genteng	S1	SDN 1 GENTENG
Genteng	Tersier Kg 1	SDN 1 GENTENG WETAN
Genteng	S3	SDN 10 KEMBIRITAN
Genteng	S1	SDN 2 GENTENG
Genteng	S1	SDN 3 GENTENG
Genteng	Tersier Kg 1	SDN 3 GENTENG WETAN
Genteng	Saluran Tersier S5 Kiri	SDN 3 KEMBIRITAN
Genteng	S3	SDN 4 GENTENG WETAN
Genteng	Tersier Jalen Ii	SDN 4 SETAIL
Genteng	S1	SDN 5 GENTENG
Genteng	Tersier Tersier S4	SDN 5 KEMBIRITAN
Genteng	Tersier Selorejo Ii	SDN 6 KALIGONDO
Genteng	S1	SDN 7 GENTENG
Sempu	Tersier Tugung Ii	MI ISLAMIYAH
Sempu	Sekunder Kalijaran	MI NURUL ISLAM
Sempu	Tersier Tugung 1	MI SAIFUL WATHON
Sempu	Tersier Jambewangi Ii	MI TAUFIQIAH
Sempu	Saluran Bsp 2	SDN 1 TEGALARUM
Sempu	Tersier Jambewangi Ii	SDN 2 JAMBEWANGI
Sempu	Sekunder Kalijaran	SDN 2 TEMUARS
Sempu	Sekunder Kalijaran	SDN 3 JAMBEWANGI
Sempu	Sungai Setail	SDN 3 SEMPU
Sempu	Tersier Sumbermas	SDN 4 JAMBEWANGI
Sempu	Sekunder Ketang	SDN 5 JAMBEWANGI
Sempu	Tersier Bse6	SDN 5 KARANGSARI
Sempu	Tersier Madunus	SDN 7 JAMBEWANGI
Sempu	Saluran Tersier Kanan 1	SDN 7 KARANGSARI

Kecamatan	Nama Saluran Irigasi	Lembaga Pendidikan
Sempu	Sungai Kedawang	SDN 8 JAMBEWANGI
Srono	Tersier Am1	SDN 3 SUMBERSARI
Srono	Tersier B. Pa 3	SDN 4 SUMBERSARI
Srono	Tersier Am3	SDN KEPUNDUNG 02
Srono	Tersier Dam Dalah	SDN KEPUNDUNG 03
Gambiran		SDN 2 PURWOHARJO
Gambiran		SDN 5 WRINGINAGUNG
Gambiran	Tersier K.A 7	SMAN 1 GAMBIRAN
Genteng	Sungai Setail	MAN 2 BANYUWANGI
Genteng	S1	SMA MUHAMADIYAH 3 GENTENG
Genteng	Sungai Setail	SMAN 1 GENTENG
Genteng	Sekunder B. Pa 1	SMAN 2 TARUNA BHAYANGKARA
Genteng	S1	SMA NU GENTENG
Genteng	Sungai Setail	SMAS PGRI 6 GENTENG
Genteng	Sungai Kembiritan	SMK BUSTANUL FALAH
Genteng	S1	SMKS MUHAMADIYAH 1 GENTENG
Genteng	Kg 1	SMKS MUHAMADIYAH 2 GENTENG
Sempu	Sekunder Tugung 1	SMA AL - MUBAAROK
Sempu	Sekunder Tugung II	SMK AL – AZHAR
Cluring	Tersier Dam Paras	SMP AL AQSO
Cluring	Tersier Dam Tamanagung Kiri	SMPN 2 CLURING
Gambiran	Tersier K.A 1	SMPN 2 GAMBIRAN
Genteng	Kg 1	MTS KEBUNREJO GENTENG
Genteng	S1	SMP AL QURAN AL MUBAROK
Genteng	S3	SMP BUSTANUL MAKMUR
Genteng	S1	SMP HARAPAN 2 GENTENG
Genteng	Kg 1	SMP KATOLIK SANTA MARIA GENTENG
Genteng	Kg 1	SMP MAARIF GENTENG
Genteng	Sekunder B. Pa 1	SMP MUHAMADIYAH 8 GENTENG
Genteng	S1	SMPN 1 GENTENG
Genteng	Sekunder B. Pa 2	SMPN 4 GENTENG
Genteng		SMPN 3 GENTENG
Sempu	Sekunder Tugung Ii	MTS ISLAMIYAH
Sempu	Tersier Tugung Ii	SMP AL – AZHAR
Sempu	Sekunder Tugung Ii	SMP MUHAMADIYAH 7
Sempu	Sekunder Ketang	SMP SULTAN AGUNG
Srono	Sekunder Bsb1	SMP 02 SRONO
Srono	Sekunder Am1	SMP MERDEKA
Tegalsari	Saluran Po4	SMP TAHFIDZUL QURAN

Sumber: Buku Panduan Program Sekardadadu

Tabel 4. 5 Zonasi Daerah Irigasi pada Kordsa Srono

Kecamatan	Nama Saluran Irigasi	Lembaga Pendidikan
Srono	Saluran Sekunder Bbi Iv	SDN 1 BAGOREJO
Srono	Saluran Tersier Bbi Iii	SDN 2 BAGOREJO
Srono	Saluran Tersier Dam Marwo	SDN 2 KEBAMAN
Srono	Saluran Sekunder Maron Ii	SDN 2 WONOSOBO
Srono	Saluran Tersier Parastembok i Ka	SDN 4 BAGOREJO
Srono	Saluran Tersier Dam Srono	SDN 4 KEBAMAN
Srono		SDN 3 BLAMBANGAN
Muncar	Kedungrejo	SMP 17 AGUSTUS 1945-2 MUNCAR
Muncar	Kali Setail	SMP DARUL ULUM
Muncar	Kedungrejo	SMP KATOLIK SINTYOSEPH
Muncar	Kedungrejo	SMP KOSGORO MUNCAR
Muncar	Kedungringin	SMPN 1 MUNCAR

Sumber: Buku Panduan Program Sekardadadu 2023

Tabel 4. 6 Zonasi Daerah Irigasi pada Kordsa Tegaldlimo

Kecamatan	Nama Saluran Irigasi	Lembaga Pendidikan
Tegaldlimo		SDN 1 KALIPAIT
Tegaldlimo		SDN 2 TEGALDLIMO
Tegaldlimo		MI AL AMIN KENDALREJO
Tegaldlimo		SDN 01 TEGALDLIMO
Tegaldlimo		SDN 04 TEGALDLIMO
Tegaldlimo		SMK 17 AGUSTUS 1945 TEGALDLIMO
Tegaldlimo	Sekunder Wringinpitu	SMAN 1 TEGALDLIMO
Tegaldlimo		SMAS FAVORIT NY TEGALDLIMO
Tegaldlimo		SMKS MUHAMADIYAH 3 TEGALDLIMO
Tegaldlimo	Kali Pait	SMPN 02 TEGALDLIMO
Tegaldlimo		SMPN 01 TEGALDLIMO
Tegaldlimo		SMP TRI BAKTI TEGALDLIMO

Sumber: Buku Panduan Program Sekardadu 2023

Tabel 4. 7 Zonasi Daerah Irigasi pada Kordsa Cluring

Kecamatan	Nama Saluran Irigasi	Lembaga Pendidikan
Cluring		SDN 4 CLURING
Cluring		SDN 1 PLAMPANGREJO
Cluring		SDN 1 KALIPURO
Cluring		SDN 3 TAMPO
Cluring		SDN 2 SARIMULYO
Cluring		SDN 1 SRATEN

Sumber: Buku Panduan Program Sekardadu 2023

Tabel 4. 8 Zonasi daerah Irigasi pada Kordsa Pesanggaran

Kecamatan	Nama Saluran Irigasi	Lembaga Pendidikan
Pesanggaran	Saluran Irigasi Sekunder Pesanggaran	SDN 3 SUMBERMULYO
Bangorejo		SDN 1 RINGINTELU
Siliragung		SDN 4 KESILIR
Siliragung		SDN 2 BULUAGUNG
Pesanggaran		SDN 7 KANDANGAN
Pesanggaran	Sumber Jambe	SMPN 1 PESANGGARAN
Pesanggaran	Sungai Apur	SMPN 2 PESANGGARAN
Pesanggaran	Gangga	SMP NU AL ISLAM
Siliragung	Kalibaru	SMPN 1 SILIRAGUNG
Siliragung	Kalilele	SMPN 2 SILIRAGUNG
Siliragung	Silirkrombang	SMPN 4 SILIRAGUNG

Sumber: Buku Panduan Program Sekardadu 2023

Tabel 4. 9 Zonasi Daerah Irigasi pada Kordsa Glenmore

Kecamatan	Nama Saluran Irigasi	Lembaga Pendidikan
Glenmore	Tersier Rujikan	MI DARUL ULUM
Glenmore	Tersier P2	SDN 1 SUMBERGONDO
Glenmore	Tersier P2	SDN 4 SUMBERGONDO
Glenmore		SDN 1 TULUNGREJO
Glenmore		MI DARUL HIKMAH
Glenmore		MI TARBIYATUL ATFAL
Glenmore	Primer Porolinggo	SMA RODULOTULSALAM
Glenmore		MA DARUL HIKMAH
Kali Baru	Kali Baru Manis	SMPN 2 KALIBARU
Kali Baru	Kali Baru Manis	SMPN 3 KALIBARU SATU ATAP
Glenmore		MTS DARUL MANIA

Tabel 4. 10 Zonasi Daerah Irigasi pada Kordsa Songgon

Kecamatan	Nama Saluran Irigasi	Lembaga Pendidikan
Songgon		PONDOK PESANTREN BUSTANUL ARIFIN
Songgon		MI N 2 BANYUWANGI
Songgon		SDN 1 SONGGON
Songgon		SDN 2 SONGGON
Songgon		SMA MUHAMADIYAH 4 SONGGON
Singojuruh	Kumbo	SMPN 1 SINGOJURUH
Singojuruh	Kumbo	SMPN MAMBAUL FALAH SINGOJURUH
Songgon		MTS ISLAMIAH SONGGON
Songgon		SMPN 1 SONGGON

Sumber: Buku Panduan Program Sekardadu 2023

Tabel 4. 11 Zonasi Daerah Irigasi pada Kordsa Kabat

Kecamatan	Nama Saluran Irigasi	Lembaga Pendidikan
Banyuwangi	Bagong	SDN 1 PAKIS
Banyuwangi	Bagong	SDN SOBO
Licin	Plampang Enceng	MIS MIFTAHUL HUDA BANJAR
Licin	Talang Gantung	Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul wathan
Licin	Pring Gading	SDN 2 BANJAR
Licin	Kranjangan	SDN 2 GUMUK
Licin	Kedawung 2	SDN 2 JELUN
Licin	Pakudo	SDN 4 KLUNCING
Licin	Kayangan	SDN 4 SEGOBANG
Licin	Plampang Enceng	SDN 1 BANJAR
Licin	Kranjangan	SDN 1 GUMUK
Licin	Plampang Enceng	SDN 1 JELUN
Licin	Kluncing	SDN 1 KLUNCING
Licin	Talang Gantung	SDN 1 SEGOBANG
Licin	Jambu	SDN 1 TAMANSARI
Licin	Pakem	SDN 2 LICIN
Licin	Pakel	SDN 2 PAKEL
Licin	Talang Gantung	SDN 2 SEGOBANG
Licin	Kranjangan	SDN 3 GUMUK
Licin	Luganti	SDN 3 KLUNCING
Licin	Mluwo	SDN 3 SEGOBANG
Licin	Jambu	SDN 4 TAMANSARI
Licin	Sbr Nongko	SDN 5 TAMANSARI
Licin	Gumuk	MTS AL AMIN
Licin	Glondok	SMPN 1 LICIN
Licin	Kedawung	SMPN 2 LICIN SATU ATAP

Sumber: Buku Panduan Program Sekardadu 2023

Tabel 4. 12 Zonasi Daerah Irigasi pada Kordsa Rogojampi

Kecamatan	Nama Saluran Irigasi	Lembaga Pendidikan
Kabat	Saluran Tersier di Tembelang Ki	SDN 1 BARENG
Kabat	Saluran Tersier Sbr. Bunder	SDN 1 BUNDER
Kabat	Saluran Tersier Pa Segawo (di Kertosari)	SDN 2 PAKISTAJI
Kabat	Saluran Tersier di Sruni	SSDN 3 BUNDER
Kabat	Saluran Tersier di Kromo	SDN 4 GOMBOLIRANG
Kabat	Saluran Tersier di Racek	SDN 2 LABANASEM
Kabat	Saluran Tersier di Putrojoyo	SDN 2 MACANPUTIH
Kabat	Saluran Tersier di Putrojoyo	SDN 3 MACANPUTIH

Kecamatan	Nama Saluran Irigasi	Lembaga Pendidikan
Kabat	Saluran Tersier Putrojoyo	SDN 6 MACANPUTIH
Licin	Saluran Tersier Pakel	SDN 3 PAKEL
Rogojampi	Tersier Sbr. Sladahan	SDN 3 ROGOJAMPI
Rogojampi	Saluran Tersier di Telepak	SDN 1 BAYU
Songgon	Saluran Tersier di Takir	SDN 3 BALAK
Songgon	Saluran Tersier di Sloyo	SDN 1 BANGUNSARI
Songgon	Saluran Tersier di Takir	SDN 2 BALAK
Songgon	Saluran Tersier di Telepak	SDN 4 BAYU
Songgon	Saluran Tersier Sbr. Bulutigo	SDN 5 BALAK
Rogojamp		SDN 1 WATUKEBO
Rogojamp		MI TARBIYATUL MUBTADIIN
Rogojamp		SMAN 1 ROGOJAMPI
Blimbingsari	Saluran Sekunder Sbr. Glondong	SMPN 1 BLIMBINGSARI SATU ATAP
Rogojampi	Saluran Sekunder Cermo	SMPN 2 ROGOJAMPI
Rogojampi	Saluran Sekunder Sumber Ori	SMP ROUDLOTUSSALAM
Songgon	Saluran Sekunder di Takir	SMPN 2 SONGGON

Sumber: Buku Panduan Program Sekardadu 2023

4.1.3 Gambaran Umum Aktor Pelaksana Program Sekardadu

Dalam pelaksanaan program Sekardadu, perlu dioptimalkan kerja sama dengan SKPD terkait dimana setiap SKPD memiliki program-program yang bisa disinergikan dengan program Sekardadu. Beberapa SKPD dan perannya dalam pelaksanaan program Sekardadu sebagai berikut:

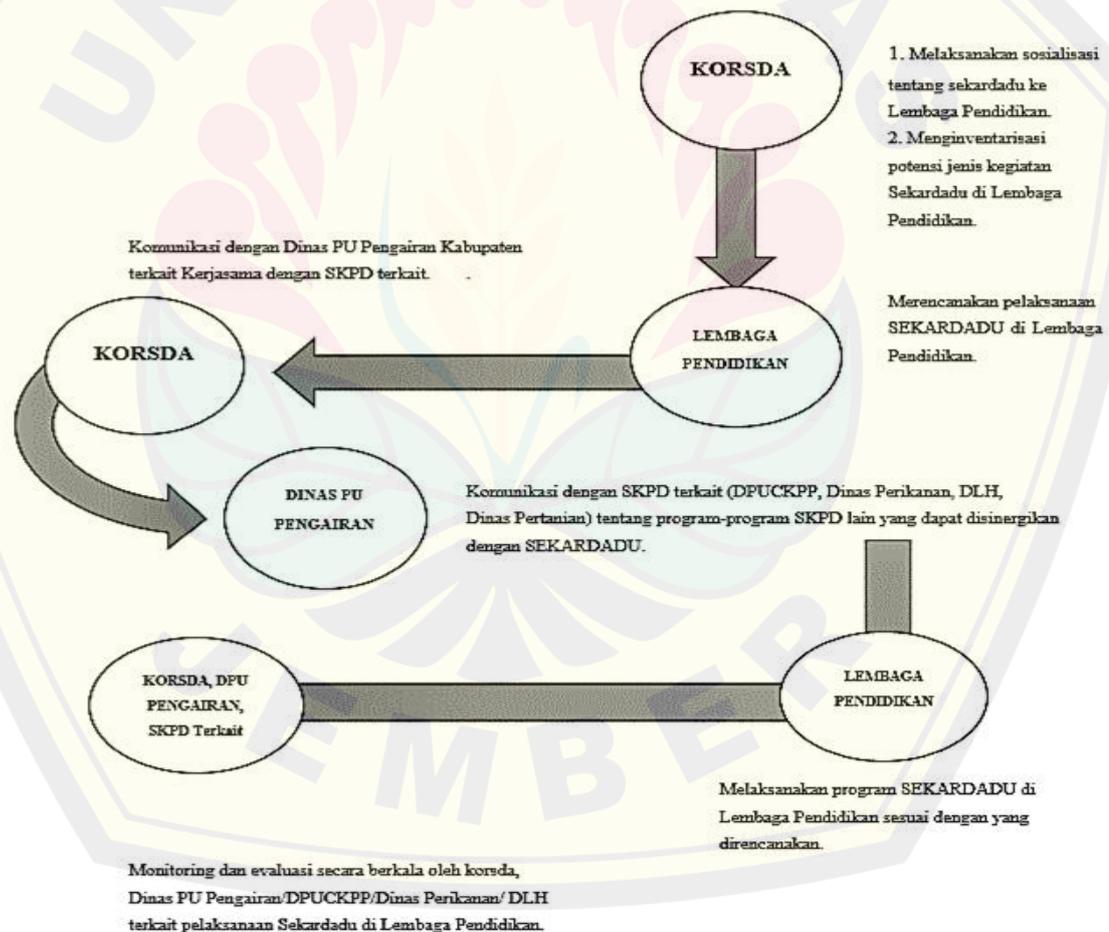
Tabel 4. 13 Stakeholder Pelaksana Program Sekardadu

No.	Stakeholder	Peran
1.	Korsda (Unit Pelaksana Teknis)	Melaksanakan monitoring & evaluasi secara berkala pada lembaga pendidikan dalam pelaksanaan Sekardadu.
2.	Dinas Pengairan	Sebagai koordinator, fasilitator, Pusat informasi, dan Pusat koordinasi pelaksanaan program Sekardadu.
3.	Dinas Pendidikan	Membantu memobilisasi lembaga pendidikan SD, SMP, SMA, dan Universitas yang tergabung kedalam program, Serta membantu Dinas Pengairan jika membutuhkan tenaga pendidik dalam melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah.
4.	Dinas Cipta Karya	Bersinergi dalam pemanfaatan ruang sumber daya air untuk RTH dan sumber edukasi terkait konservasi sumber daya air dengan pemanfaatan ruang yang tepat. Seperti kontribusi dengan menyalurkan bantuan terkait bibit tanaman jika ada kegiatan untuk melakukan penanaman pohon.
5.	Dinas Lingkungan Hidup	Bersinergi dengan program terkait pengelolaan sampah dan sumber edukasi konservasi sumber daya air melalui pengelolaan sampah yang baik. Seperti kontribusi pada kegiatan bersih-bersih sungai khususnya dalam permasalahan sampah, jika dari Dinas Pengairan membutuhkan bantuan terkait pengelolaan sampah maka dari DLH sendiri akan mengirimkan bantuan tenaga pegawai yang paham terkait permasalahan sampah.
6.	Dinas Pertanian dan pangan	Bersinergi dengan program penanaman bibit dalam pemanfaatan ruang sumber daya air dan sumber edukasi terkait konservasi sumber daya air melalui penanaman tanaman-tanaman pertanian. Seperti kontribusi membantu untuk mensosialisasikan terkait tanaman holtikultura pada saat

	sosialisasi berlangsung sebagai salah satu kegiatan dalam Sekardadu.
7. Dinas Perikanan	Bersinergi dengan program Dinas perikanan terkait budidaya perikanan dan sumber edukasi konservasi sumber daya air untuk budidaya perikanan. Seperti kontribusi dalam hal penyediaan bibit ikan jika diadakannya kegiatan penebaran bibit ikan di sungai.

Sumber: Buku Panduan Sekardadu 2023

Dalam proses perumusan kebijakan program Sekardadu terdapat beberapa instansi dalam struktur tim koordinasi dan tim pelaksananya. Sinergitas dari instansi-instansi pemerintah disini tentunya mengandung maksud agar dapat berinteraksi, berkomunikasi dan bekerjasama. Hal ini dikarenakan masing-masing instansi memiliki sumberdaya yang berbeda-beda sehingga dapat tercipta saling ketergantungan dari masing-masing instansi tersebut. Adapun alur koordinasi pada pelaksanaan program Sekardadu sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Alur Koordinasi Pelaksanaan Sekardadu

Sumber: Buku Panduan Program Sekardadu 2023

Pada gambar diatas dijelaskan bahwa dalam alur koordinasi pelaksanaan sekardadu yang diawali dengan Kordsa (Unit Pelaksana teknis) yang bertugas untuk melaksanakan sosialisasi tentang sekardadu ke Lembaga pendidikan dan menginventarisasi (pencatatan, pendataan, dan pelaporan) potensi jenis kegiatan sekardadu di Lembaga pendidikan. Lalu, nantinya Kordsa akan merencanakan pelaksanaan sekardadu di Lembaga pendidikan (SD, SMP, SMA, Universitas). Yang kemudian, kordsa mengkomunikasikannya dengan Dinas PU Pengairan serta bekerjasama dengan SKPD terkait perencanaan tersebut. Selanjutnya Dinas PU Pengairan berkomunikasi dengan SKPD (Dinas yang terlibat lainnya) tentang program-program SKPD lain yang dapat disinergikan dengan Sekardadu. Setelah itu, semua implementor yang terlibat melaksanakan program Sekardadu di Lembaga pendidikan sesuai dengan yang direncanakan. Yang diakhiri dengan Kordsa, Dinas PU Pengairan, dan SKPD lainnya akan memonitoring dan mengevaluasi secara berkala terkait pelaksanaan sekardadu di Lembaga pendidikan.

4.2 Hasil Penelitian

Dalam proses pengamatan dilapangan, ditemukan berbagai fenomena empiris yang akan dianalisis berdasarkan data yang terkumpul melalui observasi, dokumentasi dan hasil wawancara. Pada pelaksanaan program Sekardadu ini peran pemerintah dalam program memiliki kontribusi penting karena pada pelaksanaannya Bupati Ipuk Fiestiandani sebagai Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi yang menginisiasikan dan menetapkan Keputusan Bupati Banyuwangi No.188/33/KEP/429.011/2022 Tentang tim koordinasi kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sekolah rawat daerah aliran sungai di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, peran dari para pejabat publik yakni diperankan oleh Kepala eksekutif Daerah Kabupaten Banyuwangi yang mana ada Bupati sebagai pimpinan eksekutif serta 6 Organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Dinas PU Pengairan, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan, Serta Dinas Perikanan yang terlibat dan berperan penting dalam pelaksanaan program, 6 OPD tersebut termasuk kedalam implementor dari program Sekardadu. Sebagaimana hasil wawancara yang

dilakukan peneliti kepada Sub Koordiantor Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat di Dinas Pengairan yang menyatakan bahwa:

“Iya mba jadi awal mula terbentuknya Sekardadu itu berawal dari adanya permasalahan volume sampah di Kabupaten Banyuwangi yang tinggi pada saat itu, sehingga Pemerintah Kabupaten Banyuwang meluncurkan program Sekardadu ini pada Maret 2022 lalu dan juga bebarengan dengan di tetapkannya Keputusan Bupati Banyuwangi No.188/33/KEP/429.011/2022 Tentang tim koordinasi kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sekolah rawat daerah aliran sungai di Kabupaten Banyuwangi sebagai upaya menjaga daerah aliran sungai. Nantinya para implementor program yang Dinas itu tadi dan Lembaga pendidikan yang diberi mandat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan program Sekardadu ini.” (Ainiyah, 8 Januari 2024)

Selain itu, peran Bupati sebagai Kepala Daerah Banyuwangi yang menjalin kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah sebagai Implementor Program terkait pelaksanaan Program Sekardadu juga dipaparkan oleh Staf Fungsional Pengelolaan Sumber Daya air Dinas Pengairan sebagai berikut:

“Kalo peran dari bupati itu lebih kayak nanti ketika Kordsa memiliki suatu rencana untuk kegiatan Sekardadu yang akan datang maka rencana tersebut setelah didiskusikan oleh semua Tim baik Kordsa maupun Dinas dan lembaga pendidikan nantinya akan di usulkan ke Bupati, nah kalo udah disetujui baru akan kita eksekusi mbak, biasanya sih pada saat kegiatan berlangsung Bupati akan turun ke lapangan untuk berpartisipasi memeriahkan serta memantau jalannya kegiatan mbak.” (Rini, 5 Februari 2024)

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh pernyataan dari Kasubag Penyusunan Program Dinas PU Cipta Karya sebagai berikut:

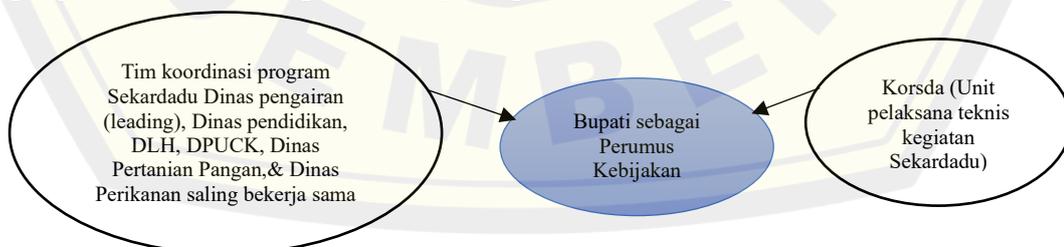
“Dari SK kan sudah tertera dengan jelas ya mbak siapa saja yang tergabung kedalam implementor program ini, Bupati sendiri yang menginisiasikan lalu menunjuk Dinas PU Pengairan sebagai leadingnya, untuk memenuhi tanggung jawab besar ini tentunya ya mbak kita sb ga mungkin kalo kerja sendiri, jadi kita juga dibantu oleh Dinas-dinas yang lain dalam menjalankan program ini. Ada 6 dinas sih mbak yang terlibat itu termasuk ke Tim koordinasi kegiatannya, Sudah dijelaskan juga pada buku panduan programnya, Ada juga Kordsa itu kayak UPT (unit pelaksana teknis) anggotanya itu pegawai pilihan dari Dinas Pengairan mbak.” (Roby, 8 Januari 2024)

Koordinasi serta kerja sama yang dilakukan oleh 6 OPD yang terlibat pada tiap-tiap kegiatan Sekardadu tidak semua OPD akan terlibat secara langsung. Hal

tersebut disampaikan oleh sub Koordinator Kerjasama dan Pemberdayaan masyarakat di Dinas pengairan bahwa:

“Dinas pengairan itu sebagai *leadingnya* mbak, ya sebagai fasilitator, sebagai koordinator serta pusat informasi, jadi Sekardadu ini program yang Dinas pengairan punyai, Dinas lainnya itu berkontribusi ketika kita butuh bantuan mereka terkait kebutuhan kegiatannya. Pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan kan beda-beda ya mbak, semisal pada kegiatan hari ini itu temanya menanam bibit pohon nah itu kita akan mengundang Dinas Cipta karya yang bersinergi dengan program yang dinas tersebut punyai, nantinya Dinas tersebut akan memberikan kontribusi dengan menyalurkan bantuan terkait bibit tanaman dan juga ikut membantu mensosialisasikan terkait konsep kegiatan tersebut. Begitupula dengan Dinas lainnya mba, jadi ga semua dinas akan terlibat secara langsung dalam satu kegiatan yang sama ya kayak gantian gitu mbak sesuai dengan kebutuhan kegiatannya.” (Ainiyah, 26 Februari 2024)

Dalam hal ini peran pemerintah Kabupaten yakni Bupati yang bekerja sama dengan para implementor program Sekardadu berperan yang menginisiasikan adanya program Sekardadu serta menerbitkan sebuah kebijakan terkait pembentukan tim koordinasi kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sekolah rawat daerah aliran sungai di Kabupaten Banyuwangi yang mana Tim koordinasi tersebut terdiri dari 6 Dinas (Dinas PU Pengairan (*leading*), Dinas PU Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan, serta Dinas Perikanan) dan Lembaga Pendidikan. Adapun Tim unit pelaksana teknis (Korsda) yang terdiri dari pegawai-pegawai pilihan dari Dinas PU Pengairan selaku *leading* dari program ini. Selain itu Bupati juga berperan untuk memantau dan memberikan izin kepada para implementor dalam menjalankan kegiatan pada program Sekardadu tersebut. Peran Bupati serta pejabat publik (Implementor) pelaksanaan program Sekardadu dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut:



Gambar 4. 2 Peran Bupati, Organisasi Pemerintah Daerah, serta Korsda

Sumber : diolah oleh peneliti

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, Komunikasi juga sangat penting untuk mencapai kesepakatan bersama serta sebagai media bagi pembentukan dan pengembangan pribadi dalam konteks sosial. Komunikasi yang berkelanjutan menunjukkan interaksi yang teratur antara pejabat yang mewakili masing-masing daerahnya serta unit pemerintah yang terlibat didalam kerja sama (Ipan, 2021:387). Aspek komunikasi ini dapat dilihat dari beberapa hal seperti frekuensi komunikasi dari hari ke hari, hubungan kerja yang terjalin, dan kemudian membentuk pola kumulatif. Jika dilihat dari frekuensi komunikasi, Kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan pada program Sekardadu ini dilakukan melalui pertemuan-pertemuan rutin ketika memang ada kegiatan tertentu. Dari perencanaan kegiatan yang akan datang, kemudian penyusunan terkait kerja sama dengan implementor lain, dan pembagian tugas masing-masing implementor. Sebagaimana pernyataan dari Sub Koordinator Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat di Dinas pengairan sebagai berikut:

“Untuk komunikasinya itu lewat pertemuan antar implementor program mbak, kalo pertemuan atau rapat secara langsung itu sering mbak ya tergantung kebutuhan kitanya mau berapa kali, kadang kita rapat di ruang rapat kadang di luar kayak gitu mba sesuai dengan kesepakatan mau mengadakan pertemuan atau rapatnya dimana.” (Ainiyah, 20 Februari 2024)

Kemudian terkait hubungan kerja sama yang terjalin antar para implementor program secara formal maupun informal. Secara formal, hubungan kerja sama antar implementor yang terlibat diwujudkan dengan adanya forum-forum pertemuan resmi. Melalui pertemuan secara langsung maupun menggunakan zoom meeting selama proses perkembangan kerja sama. Sementara itu, secara informal diwujudkan dengan komunikasi melalui telepon jika keadaan tidak memungkinkan untuk pertemuan resmi. Sebagaimana hasil wawancara dengan Staf Fungsional pengelolaan Sumber Daya Air di Dinas Pengairan bahwa:

“Kalau secara formal itu biasanya diadakan pertemuan dengan para implementor yang bertugas sebagai penyedia sumber daya nah itu kita ketemu formal mbak kan butuh tanda tangan atau yang lainnya, Nah kalo yang informal itu bisa melalui telepon atau whatsapp mbak, ya kalo lewat situ tanya-tanya tentang hal santai aja mba.” (Rini, 20 Februari 2024)

Selanjutnya, yakni pola kumulatif yang terbentuk antara para implementor dengan adanya pembahasan bersama terkait bentuk-bentuk kegiatan yang akan

dilaksanakan sebelum disepakati bersama. Masing-masing pihak yang terlibat saling menerima kritik dan saran atas kegiatan yang masuk dalam agenda kerja sama. Sebagaimana yang disampaikan oleh wawancara personal dengan sub Koordinator kerjasama yang termasuk anggota dari Kordsa sebagai berikut:

“Jadi dalam kerja sama ini selain merencanakan dan melaksanakan kegiatan secara bersama sama melalui beberapa kali pertemuan dengan pihak-pihak tertentu, kita juga akan memberikan kritik dan saran terhadap satu sama lain jika memang diperlukan, misal kayak ada beberapa anggota yang kinerjanya lambat kayak gitu kita sebisa mungkin menghadapinya dengan ngasih kritik yang tidak memojokan disertai saran yang membangun. Kan kadang ada mbak orang tuh takut dan malu kalo kita ngasih kritik didepan banyak orang nah itu ketika kita mau ngasih evaluasi kinerja, pada pegawai yang bermasalah akan kita panggil didalam ruangan jadi biar si pegawai tersebut ga malu dan takut mbak dan bisa memperbaiki kinerjanya.” (Ainiyah, 20 Februari 2024)

Namun demikian pola kumulatif terlihat belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan program di beberapa bagian, seperti dari perilaku beberapa siswa-siswi yang belum optimal dalam keterlibatannya pada program Sekardadu yang dijelaskan oleh Staf Bidang SMP dan SMA Dinas Pendidikan sebagai berikut:

“Ada salah satu kendala yang kami hadapi dalam program ini mbak, tentang siswa-siswinya yang mana dalam sebuah kegiatan itu kan membutuhkan kesadaran diri masing-masing dari pihak yang terlibat, tetapi dalam kondisi ini kadang masih ada siswa-siswi yang setelah selesainya kegiatan maka selesai juga perhatian, tanggung jawab, serta kepeduliannya akan ekosistem Sungai.” (Agus, 5 Februari 2024)

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan oleh anggota dari Kordsa Dinas pengairan bahwasanya:

“Kalo untuk itu memang ada beberapa siswa-siswi yang memiliki kesadaran diri yang rendah ga semuanya sih mbak, kalo ga ada yang mantau yasudah nggak diperhatikan lagi, memang disini belum ada aturan untuk monitoring secara berkelanjutan ke lembaga-lembaga pendidikan setelah selesainya kegiatan mbak.” (Ainiyah, 5 Februari 2024)

Dalam hal ini beberapa siswa-siswi terlihat belum memiliki komitmen yang sesuai dalam melaksanakan program Sekardadu, dengan belum adanya pola kumulatif (hubungan yang berkembang) berupa aturan atau SOP tentang

monitoring secara berkelanjutan ke lembaga-lembaga pendidikan setelah selesainya kegiatan. Hal tersebut sangat penting untuk dioptimalkan karena siswa siswi tersebut merupakan seorang kader Sekardadu yang mengedukasi lingkungannya untuk peduli terhadap kelestarian sumber daya air. Sehingga kegiatan Sekardadu tersebut akan tetap terealisasikan dan memberi manfaat kepada lingkungan sekitar untuk jangka waktu yang cukup lama. Komunikasi antar Implementor pelaksana program Sekardadu dapat dilihat pada gambar 4.3 sebagai berikut:



Gambar 4. 3 Pola Komunikasi antar Implementor

Sumber : diolah oleh peneliti

Dalam pelaksanaan program Sekardadu demi menunjang keberhasilan program maka tidak luput juga harus memperhatikan bagaimana perilaku/sikap dari para implementor saat menjalankan tugasnya. Perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek tersebut (Heri Purwanto, 1998: 62). Dalam pelaksanaan program Sekardadu, para implementor program menunjukkan respon/perilaku yang baik dengan melaksanakan peran sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan dari Staf fungsional pengelolaan sumber daya air Dinas pengairan sebagai berikut:

“Iya jadi gini mbak, nanti setelah perencanaan tentang kegiatan Sekardadu sudah diputuskan oleh teman-teman korsda nantinya akan di komunikasikan ke Dinas Pengairan terlebih dahulu, kemudian Dinas Pengairan menghubungi Dinas Pendidikan untuk memberitahukan jenis kegiatan, tempat, waktu, di ikuti dengan adanya surat undangan yang nantinya Dinas

pendidikan sendiri yang akan memobilisasikan ke Lembaga pendidikan. Selain itu Dinas Pengairan juga mengundang perwakilan dari pihak lain sebagai bentuk pengenalan Sekardadu sehingga nantinya jika Sekardadu ini cocok dengan program/kegiatan lainnya maka akan dilakukan kerja sama.” (Rini, 5 Februari 2024)

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan oleh dari Sub koordinator kerjasama dan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

“Kita buat undangan itu biar sopan dan resmi formal gitu mbak, karena ini acara ngundang banyak orang juga, biar menjamin informasi yang disampaikan semuanya sama tidak timpang tindih dan menyebabkan kebingungan dari pihak yang diundang gitu mbak.” (Ainiyah, 5 Februari 2024)

Dalam program ini perilaku para SKPD yang terlibat sudah menunjukkan perilaku yang baik dengan memenuhi segala tanggung jawab tugasnya yang didasarkan kepada SOP program. Dimulai dengan adanya surat undangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sekardadu kepada para implementor yang terlibat. Dinas Pengairan selaku *leading* program mengawalinya dengan memberitahu dan mengundang implementor, lembaga pendidikan, serta pihak lainnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan dengan mengirimkan surat undangan sebagai bentuk pemberian informasi resmi dan formal, serta menjamin kesamaan informasi agar tidak timpang tindih dan membantu kesepahaman diantara semua pihak.

Selain perilaku, Kepercayaan dalam kolaborasi juga dianggap sangat penting karena sebuah kolaborasi tidak hanya berkaitan dengan tawar-menawar, akan tetapi juga berkaitan dengan pembangunan sebuah kepercayaan pada *stakeholder* yang terlibat yang akan sangat berguna dalam jangka panjang kedepannya (Gunawan dan Ma'ruf, 2020:5). Para implementor program Sekardadu saling menaruh kepercayaan yang tinggi kepada satu sama lain demi tercapainya keberhasilan pada program Sekardadu ini. Kepercayaan yang kuat tersebut dibarengi dengan integritas (kejujuran), kompetensi (kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan dilandasi oleh pengetahuan dan keterampilan), serta keterbukaan komunikasi antar para implementor yang dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kasubag Penyusunan Program Dinas PU Cipta Karya sebagai berikut:

“Jadi nanti dari korsda dulu mbak, kegiatan yang sudah ditentukan atau direncanakan akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan kabid dan kadis dari Dinas Pengairan yang kemudian nantinya kabid dan kadisnya yang akan mengkoordinir atau mengkomunikasikan ke implementor lain serta Lembaga Pendidikan tentang perencanaan dan pelaksanaan Sekardadu tersebut dan ketika ada kendala atau kesulitan kami para tim berusaha sebisa mungkin berterus terang berkomunikasi dengan terbuka ke anggota tim lain untuk mencari bantuan dan solusi sehingga kesulitan tersebut tidak menghalangi jalannya kita untuk melaksanakan kegiatan mbak.” (Roby, 8 Januari 2024)

Selain integritas dan keterbukaan komunikasi, memiliki nilai kompetensi juga diperlukan dalam artian menyadari kemampuan dan kelemahan kemudian menawarkan bantuan ketika bisa melakukannya serta mencari sumber daya dan bantuan ketika membutuhkannya. Dalam hal pelaksanaan Sekardadu ini pentingnya untuk memilih Implementor sesuai dengan kemampuan yang dibutuhkan dalam melaksanakan program yang dijelaskan oleh Staf fungsional Pengelolaan Sumber daya air Dinas Pengairan sebagai berikut:

“Untuk pemilihan implementor itu sebagian besar kita menyesuaikan dengan isi dari SK Bupati mbak, Ada 2 tim disini mbak tim unit pelaksana teknis (korsda) terdiri dari pegawai pilihan dari Dinas PU Pengairan dan tim koordinasi kegiatan yang mana ada 6 Dinas yang terlibat yang dipilih berdasarkan fungsi dan kepentingannya dalam menjalankan kegiatan pada program Sekardadu ini, Selain 6 Dinas tersebut kita juga akan melibatkan dinas-dinas lainnya sesuai dengan kebutuhan pada pelaksanaan kegiatan Sekardadu selanjutnya mbak.” (Rini, 8 Januari 2024)

Memiliki rasa kepercayaan yang kuat dari masing-masing implementor program yakni Korsda dan Tim Koordinasi kegiatan (SKPD) dibuktikan dengan terbangunnya integritas, kompetensi, serta keterbukaan komunikasi antar satu sama lain. Hal tersebut menjadi faktor penting bagi pelaksanaan setiap kebijakan ketika akan dilaksanakan sehingga dapat memberikan dampak yang baik terhadap keberhasilan program.

Dalam hal persepsi atau anggapan implementor program pada pelaksanaan program Sekardadu dapat dijelaskan pada wawancara peneliti dengan Sub Koordinator Pengelolaan limbah Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

“Iya mbak Sekardadu ini memang dibentuk pada awalnya untuk membangun SDM yang peduli dengan DAS mbak, dengan Sekardadu ini kita percaya akan bisa *survive* dengan kegiatan-kegiatan Sekardadu seperti kerja bakti membersihkan sampah disungai, penanaman bibit pohon, penyebaran bibit ikan, pemasangan screen barrier, pengelolaan sampah, dll disertai game seru-seruan agar memberikan suasana yang tidak ngantuk justru para implementor serta peserta dari anak-anak sekolah yang berpartisipasi akan merasa terhibur dengan keseruan dalam kegiatan tersebut, sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti itu kita percaya dapat menjaga kelestarian sumber daya air.” (Nia, 8 Januari 2024)

Pernyataan tersebut kemudian didukung oleh pernyataan dari Staf Bidang SD Dinas Pendidikan sebagai berikut:

“Dari pelaksanaannya bisa dikatakan sampe saat ini kita berpatokan pada SOP mba, Alhamdulillah tahun kemarin juga sekardadu bisa bersaing dengan program-program lainnya sehingga mampu masuk kedalam top 30 kompetisi inovasi pelayanan publik (Kovablik) Jawa Timur, meskipun begitu kita tetap akan terus meningkatkan inovasi-inovasi untuk kegiatan Sekardadu yang akan datang.” (Yudha, 5 Februari 2024)

Persepsi (anggapan) para implementor program dibuktikan dengan cara pandangannya terhadap permasalahan yang sedang mereka hadapi lalu pemecahan solusi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menunjang keberhasilan pada program Sekardadu. Para implementor menganggap dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Sekardadu tersebut dapat membangun SDM yang peduli dengan daerah aliran sungai di Kabupaten Banyuwangi, dibarengi dengan menunjukkan sikap yang baik dan tidak monoton bekerja sesuai dengan tugas masing-masing dengan membuat inovasi-inovasi dalam kegiatannya agar memberikan kenyamanan bagi peserta yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program Sekardadu. Selain itu, program Sekardadu ini juga masuk kedalam 30 terbaik pelayanan publik se-Jawa Timur 2023 sebagai salah satu bentuk keberhasilan pelaksanaan program dari para implementor.

Dalam Pelaksanaan Sekardadu ini, ada beberapa hal yang dijadikan sebagai Standart Operating Procedure (SOP) yang dibuat oleh Tim Koordinasi dan Pelaksana Kegiatan Sekardadu Sebagaimana yang dijelaskan oleh KaSub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan bahwa:

“Program ini punya SOP untuk mengatur bagaimana alur kegiatannya mbak, alur SOP nya dimulai dari Kordsa yang merencanakan kemudian akan di diskusikan dengan Dinas Pengairan dan lembaga pendidikan terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, Kemudian Dinas Pengairan menghubungi Dinas Pendidikan untuk memobilisasi sekolah mana yang akan diajak berpartisipasi untuk melaksanakan kegiatan, dengan Dinas Pengairan yang membuat surat undangan yang mana akan dikirim ke dinas-dinas yang terlibat serta Lembaga pendidikan. Kemudian pada saat kegiatan berlangsung Kordsa, dan perwakilan dinas-dinas dan Lembaga pendidikan, serta siswa-siswi yang terlibat akan datang dan ikut melaksanakan kegiatan tersebut.” (Rustam, 8 Januari 2024)

SOP PELAKSANAAN SEKARDADU

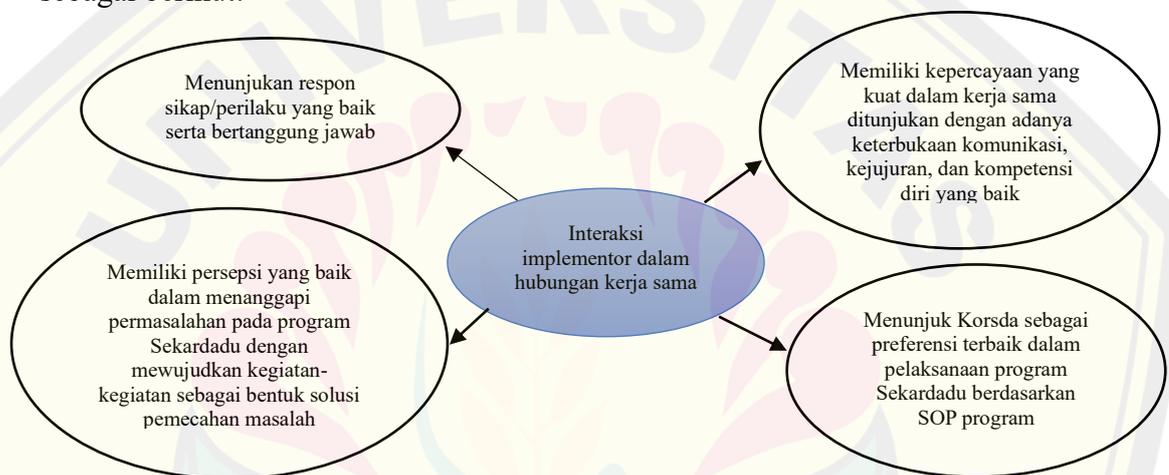
No	Uraian Kegiatan	KORSDA	LEMBAGA PENDIDIKAN	DINAS	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Kordsa mengunjungi Lembaga Pendidikan (SD, SMP, dan Perguruan Tinggi)	Mulai			- Kendaraan bermotor	30 Menit	Kunjungan Kordsa ke Lembaga Pendidikan	
2	Kordsa melakukan sosialisasi Sekardadu ke pihak Lembaga Pendidikan	Kordsa melakukan sosialisasi ke Lembaga Pendidikan			- Bahan Paparan	90 Menit	Lembaga Pendidikan telah paham mengenai Sekardadu	
3	Kordsa melakukan inventarisasi dan pemetaan potensi lembaga pendidikan	Kordsa melakukan inventarisasi dan pemetaan potensi			- Buku Catatan - Alat Tulis	120 Menit	Dokumen inventarisasi dan pemetaan	
4	Lembaga Pendidikan melakukan perencanaan kegiatan		Perencanaan Kegiatan		- Komputer - Printer - Alat Tulis - Buku Catatan	90 Menit	Laporan Perencanaan Kegiatan	
5	Lembaga Pendidikan berkoordinasi ke Kordsa untuk pelaksanaan kegiatan	Lembaga Pendidikan berkoordinasi dengan Kordsa			- Kendaraan Bermotor - Dokumen Perencanaan Kegiatan	30 Menit	Laporan hasil koordinasi	
		A						
		A						
6	Pelaksanaan Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Sekardadu dengan didampingi Kordsa			- Alat Kebersihan - Tempat Sampah - Banner	120 Menit	- laporan pelaksanaan	
7	Monitoring dan evaluasi oleh pihak Dinas	Monitoring dan evaluasi		Selesai	- Komputer - Printer - Laporan pelaksanaan kegiatan	selesai	- laporan hasil monev	

Gambar 4. 4 Standart Operating Procedure (SOP) Pelaksanaan Sekardadu

Sumber: Dokumen Dinas Pengairan Kabupaten Banyuwangi

Preferensi (kecenderungan) dalam program Sekardadu ini bisa dilihat melalui SOP program, kecenderungan dalam melaksanakan kegiatan Sekardadu ada pada tim Kordsa karena Kordsa (Unit pelaksana teknis) merupakan pegawai pilihan dari Dinas Pengairan yang dipilih berdasarkan kemampuannya yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kordsa bertugas sebagai tim pengamat dilapangan yang merencanakan, memonitoring, dan mengevaluasi semua kegiatan Sekardadu

yang dilaksanakan. Disisi lain Kordsa juga bekerjasama dan berkoordinasi dengan 6 dinas (sebagai penyedia sumberdaya) dan lembaga pendidikan. Pada program Sekardadu preferensi terhadap kordsa dalam pelaksanaannya dianggap sebagai keputusan yang tepat karena para implemendor yang didasarkan pada SOP program berpendapat dengan adanya kordsa dapat memaksimalkan pelaksanaan pada kegiatan sekardadu sehingga dapat memberi kepuasan terhadap hasil pelaksanaan program. Kemudian para implemendor pelaksana program tersebut akan menjalankan tugas-tugasnya seperti yang tertera pada SOP. Interaksi yang terjalin antar Implemendor program Sekardadu dapat dilihat pada gambar 4.5 sebagai berikut:



Gambar 4. 5 Interaksi antar Implementor Program Sekardadu

Sumber : diolah oleh peneliti

Mengenai pelaksanaan pada program Sekardadu ini semua anggaran kegiatan menggunakan dana dari APBD Kabupaten Banyuwangi dimana pembagiannya disesuaikan dengan porsi anggaran yang tersedia. Sebagaimana hasil wawancara dengan Staf Fungsional Pengelola Sumber daya air Dinas Pendidikan bahwa:

“Kalau pengalokasian anggaran itu dari Tim pelaksana teknis atau dinas sendiri yang membagi dananya itu untuk mitra siapa saja. Jadi, memang dari OPD nya yang menyaring anggarannya untuk kerja sama dengan mitra, dan untuk belanja keperluan kegiatan. Ketika memang ada kegiatan itu pake APBD mbak jadi menyesuaikan dana yang dipunyai. Menyesuaikan anggaran yang tersedia.” (Rini, 26 Februari 2024)

Pernyataan tersebut kemudian dikuatkan lagi dengan pernyataan dari Sub Koordinator Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai berikut:

“Dinas pengairan itu sebagai fasilitator kasarannya kita cuma menyediakan tempat, sedangkan Kordsa itu sebagai pelaksana teknisnya, untuk dinas-dinas lainnya yang terlibat itu yang membantu kita dalam bentuk bantuan barang ataupun jasa (sumberdayanya), semua pengeluaran berdasarkan SK ya dibebankan pada APBD. Tapi meskipun begitu masih aja sih mbak ada kendala kita kan butuh sosialisasi ya mbak terkait program ini ke sekolah-sekolah jadi kita ngumpulin peserta di satu tempat itu juga butuh konsumsi kan mbak, nah ini biaya untuk konsumsinya masih belum ada, sebenarnya masalah ada di SPJ nya mbak, kita masih kesusahan untuk menyusun SPJ nya karena kan peserta yang terlibat dalam program ini itu dari para pelajar sehingga bentuk SPJ-nya itu berupa tanda tangan atau absensi siswa mbak.” (Ainiyah, 26 Februari 2024)

Lalu pada aspek dampak terhadap kebijakan lainnya, kerja sama ini tidak mengakibatkan perubahan pada kebijakan daerah yang lainnya. Sebagaimana pernyataan dari Sub Koordinator Kerjasama Dinas pengairan sebagai berikut:

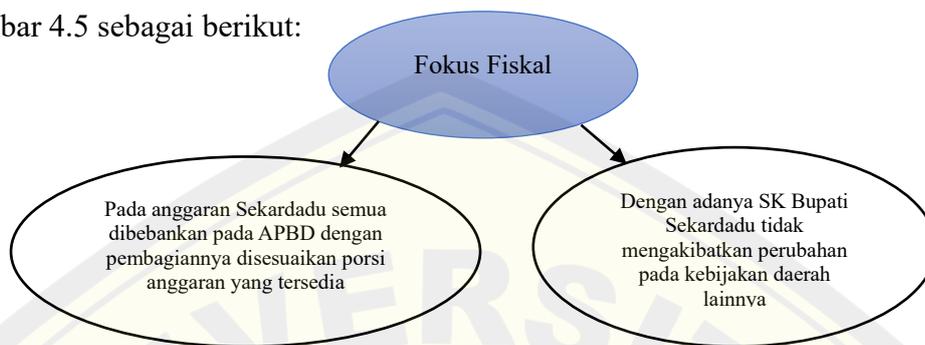
“Engga sih. Tetap berjalan sebagaimana yang sudah ditetapkan sebelumnya Karena memang setiap program itu mbak pasti sudah direncanakan dari jauh-jauh hari dan ketika disahkan juga udah ada undang-undang atau SK nya sebagai tanda bahwa program ini dapat dipertanggung jawabkan. Termasuk program Sekardadu ini.” (Ainiyah, 26 Februari 2024)

Pernyataan ini kemudian ditambahkan oleh pernyataan dari Staf Bidang SMP dan SMA Dinas Pendidikan sebagai berikut:

“Malahan bisa dikatakan dengan adanya Sekardadu ini turut memberikan dampak positif pada kegiatan/program dari dinas-dinas lainnya mbak, karena Sekardadu ini kan juga mengajak dinas lainnya untuk bekerja sama dengan mengkolaborasikan kegiatan dari dinas lain yang cocok dengan kegiatan pada program Sekardadu.” (Agus, 26 Februari 2024)

Pada program Sekardadu ini, pelaksanaan program menggunakan APBD pembagiannya disesuaikan dengan porsi anggaran yang tersedia. Kegiatan Sekardadu menggunakan anggaran penuh dari APBD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, meskipun terkendala dengan belum adanya anggaran khusus terkait konsumsi, Untuk Dinas Pengairan yang menjadi fasilitator, Kordsa sebagai unit pelaksana teknis, dan Dinas lainnya yang membantu menyediakan sumber daya

yang dibutuhkan. Pada aspek dampak terhadap kebijakan lainnya, Program Sekardadu ini tidak mengakibatkan perubahan pada kebijakan daerah yang lainnya. Karena sudah ada SK bupati yang mempertanggung jawabkan adanya program Sekardadu ini. Fokus fiskal pada pelaksana program Sekardadu dapat dilihat pada gambar 4.5 sebagai berikut:



Gambar 4. 6 Fokus Fiskal pada Program Sekardadu

Sumber : diolah oleh peneliti

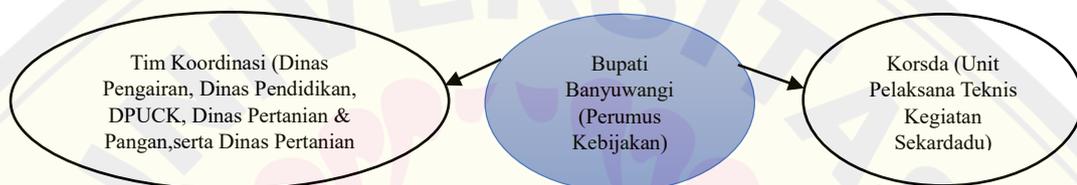
4.3 Pembahasan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep teori Koordinasi menurut pendapat Hasibuan (2011:88) bahwa dalam mewujudkan suatu koordinasi dibutuhkan 2 tipe koordinasi dan juga 4 faktor pendukung yaitu sebagai berikut:

4.3.1 Koordinasi secara Vertical

Koordinasi secara vertical merupakan bentuk dari adanya hubungan yang terjalin antar pemerintahan baik dengan pemerintahan yang lebih tinggi (Bupati) atau di bawahnya (organisasi pemerintah daerah). Dalam pelaksanaan program Sekardadu di Kabupaten Banyuwangi, peran penting dimiliki oleh Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi yakni Bupati Ipuk Fiestiandani. Berawal dari Bupati yang menginisiasikan terkait adanya program Sekardadu yang mana berfokus untuk peduli terhadap kelestarian sumber daya air. Yang kemudian mulai menetapkan Keputusan Bupati Banyuwangi No.188/33/KEP/429.011/2022 Tentang tim koordinasi kegiatan dan pelaksanaan kegiatan Sekardadu di Kabupaten Banyuwangi. Dengan adanya SK tersebut Bupati memberikan mandat kepada Dinas Pengairan sebagai *leading* dalam pelaksanaan program Sekardadu, total ada 6 dinas yang bekerja sama dan saling berkoordinasi (Dinas PU Pengairan, Dinas

PU Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan, serta Dinas Perikanan) dan juga Lembaga Pendidikan. Adapun Tim unit pelaksana teknis (Korsda) yang terdiri dari pegawai-pegawai pilihan dari Dinas PU Pengairan selaku *leading* dari program ini. Selain itu Bupati juga berperan memantau jalannya kegiatan dengan turun langsung ke lapangan serta memberikan izin kepada para implementor dalam menjalankan kegiatan Sekardadu. Peran penting yang dilakukan Bupati sebagai Kepala eksekutif daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan program Sekardadu yang melibatkan hubungan koordinasi dan kerja samanya dengan 6 organisasi pemerintah daerah dapat memenuhi atau mengisi dimensi dalam teori koordinasi oleh Hasibuan (2011).



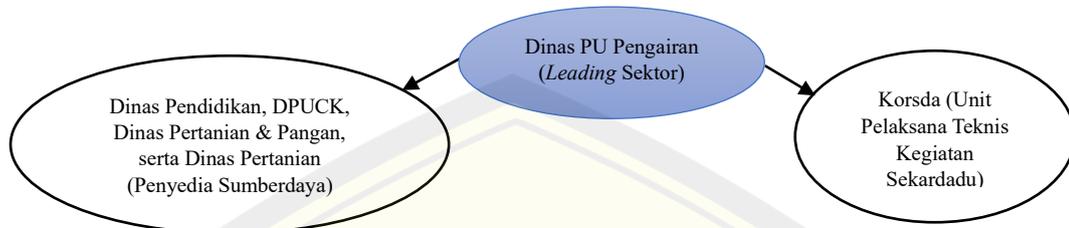
Gambar 4. 7 Koordinasi secara Vertical antar Implementor

Sumber : diolah oleh peneliti

4.3.2 Koordinasi secara Horizontal

Koordinasi secara horizontal merupakan suatu usaha kerja sama yang terjadi pada pemerintahan dengan tingkatan yang sama. Pelaksanaan program Sekardadu tentu tidak luput dari peran penting yang dijalankan oleh para pejabat publik yang terlibat kerja sama. Pada pelaksanaannya 6 Organisasi perangkat daerah (OPD) yakni Dinas PU Pengairan, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan, Serta Dinas Perikanan yang terlibat berperan penting dalam terlaksananya kegiatan pada program sekardadu ini, 6 OPD tersebut termasuk kedalam implementor dari program Sekardadu dengan Dinas pengairan sebagai *leading* dari program ini. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Dinas pengairan membentuk korsda sebagai unit pelaksana teknis yang mana anggotanya terdiri dari pegawai pilihan dari Dinas pengairan yang memiliki kemampuan khusus dibidangnya. Adapula dinas lainnya seperti Dinas PU Cipta Karya, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pangan, Serta Dinas Perikanan yang memberikan bantuan dalam penyediaan sumber daya

sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Peran penting pejabat publik yakni 6 Organisasi pemerintah daerah yang saling menjalin koordinasi dalam pelaksanaan Sekardadu menandakan dapat memenuhi dimensi konsep yang ada dalam teori koordinasi oleh Hasibuan (2011).



Gambar 4. 8 Koordinasi secara Horizontal antar Implementor

Sumber : diolah oleh peneliti

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi menurut Hasibuan (2011) adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan Tindakan

Pada faktor kesatuan tindakan dibuktikan dengan adanya rasa kepercayaan, persepsi, dan preferensi. Pada aspek kepercayaan, terbukti dengan keterbukaan komunikasi dan juga integritas (kejujuran) antar para implementor yang mana pada setiap pelaksanaan kegiatan selalu diawali dengan komunikasi persoalan rencana kegiatan yang akan datang yang dikomunikasikan dengan semua implementor secara transparan. Lalu ketika kedatangan adanya permasalahan atau kendala dalam menjalankan kegiatan para implementor program berusaha sebisa mungkin berterus terang berkomunikasi secara terbuka dengan implementor lain untuk mencari bantuan serta solusi tanpa menghalangi pelaksanaan kegiatan Sekardadu. Selain itu memiliki nilai kompetensi diri yang dibuktikan dengan pemilihan implementor untuk pelaksanaan Sekardadu yang sesuai dengan kapabilitas yang dibutuhkan, dalam menjalankan program ini korsda dibantu dengan 6 Dinas yang terlibat sebagai penyedia sumber daya yang saling bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan Sekardadu, di sisi lain para implementor juga akan melibatkan dinas-dinas atau pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan pada pelaksanaan kegiatan sekardadu selanjutnya. Aspek kedua yakni persepsi, pada pelaksanaan program Sekardadu ini memang difokuskan untuk menjaga kelestarian sumber daya air, para implementor

dihadapkan pada permasalahan sampah, sehingga dari sudut pandang cara para implementor ingin mewujudkan kegiatan-kegiatan yang akan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Para implementor menganggap dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Sekardadu tersebut dapat membangun SDM yang peduli akan DAS, Mulai dari kegiatan kerja bakti membersihkan sampah disungai, menanam bibit pohon, penyebaran bibit ikan, pemasangan screen barrier, pengelolaan sampah, disertai game seru-seruan agar kegiatan tersebut tidak monoton dan memberikan kesan nyaman untuk para peserta yang hadir. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Sekardadu dapat berjalan sesuai dengan target atau sasaran kegiatan. Dibuktikan dengan program Sekardadu ini masuk kedalam top 30 kompetisi inovasi pelayanan publik (kovablik) se-jawa timur. Terakhir, preferensi atau kecenderungan terhadap suatu objek, yang mana pada preferensi program Sekardadu didasarkan pada SOP pelaksanaan program. Preferensi terhadap korsda (Unit pelaksana teknis) dalam upaya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada program Sekardadu memang sangat dibutuhkan, karena korsda yang bertugas sebagai tim perencana, pengamat dilapangan, memonitoring, dan mengevaluasi semua kegiatan Sekardadu. Dengan demikian peran yang dikerjakan korsda sangat besar sehingga menjadi preferensi terbaik bagi pelaksanaan program Sekardadu ini, namun demikian korsda juga bekerja sama dengan 6 dinas lainnya serta lembaga pendidikan untuk membantu dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan Sekardadu.

2. Komunikasi

Dalam faktor ini ada 3 konsep penting yang mempengaruhi dalam komunikasi yang berkelanjutan dengan menunjukkan interaksi yang teratur antar para implementor. Pertama, frekuensi komunikasi dari hari ke hari, hal tersebut terlihat pada pertemuan-pertemuan rutin yang dilakukan oleh para implementor program ketika ada kegiatan tertentu seperti perencanaan kegiatan, penyusunan kerja sama, dan pembagian tugas implementor. Kedua, hubungan kerja yang terjalin antar para implementor baik secara formal ataupun informal. Hubungan kerja secara formal diwujudkan dengan adanya forum-forum pertemuan resmi melalui pertemuan langsung maupun via zoom meeting selama proses pengembangan kerja

sama. Sedangkan secara informal diwujudkan jika kondisi tidak memungkinkan untuk pertemuan resmi yakni dengan berkomunikasi melalui telepon. Terakhir yakni pola kumulatif (hubungan yang berkembang) antar para implementor, pada saat pembahasan bersama terkait susunan kegiatan yang akan dilaksanakan sebelum disepakati bersama, dalam penyusunan kegiatan pasti ada tahap evaluasi pada kegiatan-kegiatan sebelumnya, masing-masing pihak yang terlibat saling menerima kritik dan saran atas kegiatan yang masuk dalam agenda kerja sama. Sedangkan pola kumulatif antar implementor program dengan lembaga pendidikan terlihat belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan program di beberapa bagian, seperti dari perilaku beberapa siswa-siswi yang belum optimal dalam keterlibatannya pada program Sekardadu. Di beberapa perilaku siswa-siswi didapati memiliki komitmen yang rendah dalam melaksanakan program Sekardadu, sebab belum adanya pola kumulatif (hubungan yang berkembang) berupa aturan atau SOP tentang monitoring secara berkelanjutan ke lembaga-lembaga pendidikan setelah selesainya kegiatan. Pada dimensi ini dapat dikatakan 2 dari 3 konsep sudah terpenuhi yakni pada aspek frekuensi komunikasi dari hari ke hari dan hubungan kerja yang terjalin, akan tetapi pada aspek pola kumulatif masih ditemukan ketidaksesuaian untuk melengkapi konsep-konsep penting dalam teori koordinasi oleh Hasibuan (2011).

3. Pembagian Kerja

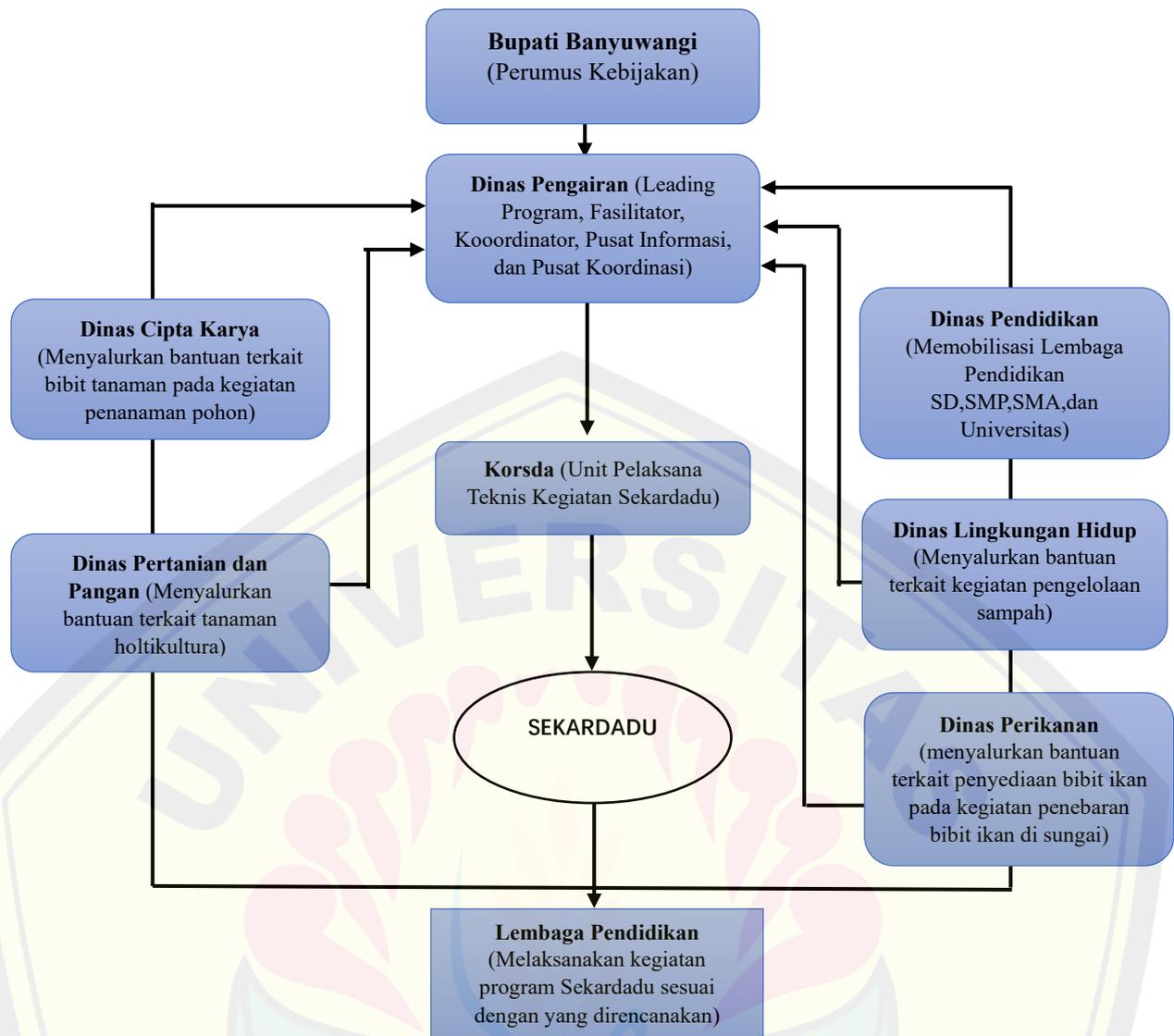
Pembagian kerja menjadi tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan. Ada beberapa aspek yang mempengaruhinya yang terdiri dari pembagian staf, informan, kewenangan, fasilitas, dan anggaran. Pertama untuk staf atau implementor, dalam kategori ini pada pelaksanaan program memiliki jumlah staf yang relevan dengan kebutuhan kegiatan yakni ada 1 tim teknis (korsda) dan 6 Dinas sebagai tim koordinasi kegiatan Sekardadu yang mana hal tersebut sudah lebih dari cukup untuk pembagian tugas yang merata. Selain itu, para implementor program juga memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang yang digelutinya, dimulai dengan adanya pembentukan Unit pelaksana teknis (Korsda) yang mana anggota yang tergabung ke dalam korsda adalah pegawai-pegawai pilihan yang bekerja di Dinas PU Pengairan yang memiliki keahlian khusus dibidang teknis program pada kegiatan

Sekardadu. Untuk tim koordinasi kegiatan yang terdiri dari 6 Dinas sendiri dipilih berdasarkan fungsi dan kepentingan pada program Sekardadu, Sehingga dengan kapabilitas tersebut tugas-tugas yang dilaksanakan dapat berjalan dengan efisien dan tepat sasaran. Kedua, informasi. Dalam aspek ini informasi untuk program Sekardadu dapat dilihat secara jelas melalui SOP pelaksanaan Sekardadu sehingga para implementor dapat mengetahui serta memahami secara nyata mengenai *job description* masing-masing implementor. Ketiga, Kewenangan yang mana dapat dilihat pada Keputusan Bupati Banyuwangi No.188/33/KEP/429.011/2022 Tentang tim koordinasi kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sekolah rawat daerah aliran sungai di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, pada buku panduan Sekardadu juga dijelaskan mengenai wewenang para implementor program. Keempat adalah fasilitas dimana Dinas Pengairan sendiri berperan sebagai fasilitator menyediakan beberapa sarana dan prasarana seperti penyediaan barang cetakan dan penggandaan, media cetak atau elektronik untuk keperluan sosialisasi melalui media online maupun melalui media cetak lokal, penerbitan buku panduan Sekardadu, alat tulis, komputer, serta kendaraan untuk perjalanan dinas. Terakhir yakni anggaran. Sesuai dengan SK Bupati yang mana anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan Sekardadu ini semua dibebankan pada APBD Kabupaten Banyuwangi sehingga dalam pembagiannya disesuaikan dengan porsi anggaran yang tersedia. Dalam hal ini para implementor program terkendala karena tidak ada anggaran khusus terkait pemberian konsumsi untuk peserta pelatihan. Hal tersebut disebabkan belum adanya SPJ tentang anggaran khusus konsumsi. Maka pada faktor pembagian kerja menunjukkan 5 dari 4 konsep sudah terpenuhi yakni pada aspek staf, informasi, kewenangan, serta fasilitas, akan tetapi pada aspek anggaran masih ditemukan ketidaksesuaian untuk melengkapi konsep-konsep penting dalam teori koordinasi oleh Hasibuan (2011).

4. Disiplin

Pada faktor ini, aspek perilaku sangat berperan penting dalam pelaksanaan program. Perilaku implementor program dalam pelaksanaan kegiatan Sekardadu ini terwujud dengan baik yang mana dalam menjalankan perannya implementor seperti

Korsda, dan 6 dinas yang terlibat memiliki perasaan yang patuh dan taat pada peraturan serta bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing, Dibuktikan dengan Implementor yang tergabung kedalam program Sekardadu ini dalam melaksanakan kegiatan programnya mengacu pada Standart Operating Procedure (SOP) yang dibuat oleh Tim Koordinasi dan Pelaksana Kegiatan Sekardadu. Melalui SOP yang ada para implementor program akan bekerja sesuai dengan alur kegiatan yang telah dijelaskan dalam sistem yang ada dimana Korsda nantinya sebagai perencana dan memantau semua kegiatan program yang akan dijalankan oleh para implementor (SKPD). Mulai dari kelengkapan, waktu, serta Output sudah tertera secara jelas melalui SOP program Sekardadu. Dengan adanya SOP tersebut, implementor program dapat menjalankan tugas-tugasnya secara transparan sesuai dengan tata cara kerja yang berlaku. Selain itu rasa tanggung jawabnya dibuktikan dengan Dinas Pengairan mengirim dan mengundang para partisipan yang terlibat sebagai bentuk pemberian informasi resmi formal, serta menjamin kesamaan informasi dengan pemahaman diantara semua pihak. Dinas Pengairan juga mengundang pihak lainnya sebagai bentuk partisipan dalam kegiatan Sekardadu yang nantinya akan mensinergikan program Sekardadu dengan program lainnya, sehingga nantinya Sekardadu tidak hanya melibatkan 6 dinas saja, tetapi akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Sehingga jika di analisis melalui teori koordinasi yang dikemukakan oleh Hasibuan (2011) maka pada faktor disiplin menandakan dapat memenuhi dimensi konsep yang ada dalam teori tersebut.



Gambar 4. 9 Skema Pola Koordinasi Pelaksanaan Sekardadu

Sumber: diolah oleh peneliti

Pada gambar 4.9 dijelaskan bahwa Pola Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu) di Kabupaten Banyuwangi terjadi koordinasi dan kerja sama cukup baik antar implementor program. Terbukti dengan terpenuhinya 2 tipe koordinasi yakni baik secara vertikal maupun horizontal oleh Hasibuan (2011). Meski terdapat beberapa permasalahan pada koordinasi antar implementor dengan lembaga pendidikan dan belum adanya anggaran untuk konsumsi yang mana belum memenuhi konsep penting dalam teori koordinasi oleh Hasibuan (2011).

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan-temuan dilapangan mengenai Pola Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai (Sekardadu) di Kabupaten Banyuwangi berjalan cukup baik. Pada koordinasi secara vertical, peran yang dilakukan oleh pimpinan eksekutif daerah yakni Bupati Banyuwangi serta jajaran organisasi perangkat daerah sudah berjalan dengan semestinya. Kemudian pada koordinasi secara horizontal, koordinasi antar pejabat publik yakni antara organisasi pemerintah daerah dalam kerja sama berjalan dengan baik sesuai dengan peran dan fungsinya. Pada faktor Kesatuan Tindakan, Para implementor menunjukkan saling memiliki rasa kepercayaan masing-masing yang didukung oleh adanya keterbukaan komunikasi, integritas (kejujuran), serta memiliki nilai kompetensi diri yang baik. Selain itu para implementor juga menunjukkan persepsi atau anggapan yang baik bahwa para implementor program sama-sama menganggap kerja sama yang dilakukan ini bersifat penting karena dapat menunjang tujuan dari adanya program Sekardadu tersebut. Kemudian implementor program juga memiliki preferensi yang baik karena pada program Sekardadu ini sudah memiliki SOP yang mengatur secara jelas bagaimana bentuk preferensi yang diinginkan. Kemudian pada faktor Komunikasi yang terjalin antar para implementor menunjukkan intensitas keteraturan yang baik pada frekuensi komunikasi dari hari ke hari. Selain itu terwujudnya hubungan kerja sama yang terjalin dengan beberapa pihak baik dilakukan secara formal maupun informal. Sedangkan pola kumulatif antar implementor program dengan lembaga pendidikan terlihat belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan program. Kemudian pada faktor pembagian kerja, sudah memiliki staf/pegawai yang sesuai dengan kapabilitas yang dibutuhkan, Selain itu sudah memiliki Standart Operating Procedure mengenai informasi *job description*, Selain itu sudah disediakan fasilitas yang memadai, Untuk anggaran program Sekardadu berasal dari APBD Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan yang tercantum dalam Surat keputusan Bupati Banyuwangi serta tidak mempengaruhi kebijakan pembangunan daerah lainnya.

Namun dalam pengalokasiannya belum berjalan dengan lancar karena masih terkendala dengan belum adanya anggaran khusus terkait konsumsi. Pada faktor disiplin, perilaku implementor program menunjukkan hasil yang baik.

5.2 Saran

Dalam hal siswa-siswi selaku (kader) yang dinilai memiliki komitmen yang rendah terhadap pelaksanaan program, maka peneliti menyarankan agar para implementor program memasukan agenda monitoring setiap 1 bulan sekali ke lembaga-lembaga pendidikan yang telah melaksanakan kegiatan Sekardadu sehingga monitoring bukan hanya pada saat pra-kegiatan dan selama kegiatan berlangsung saja tetapi juga setelah selesainya kegiatan hingga hari-hari berikutnya sebagai bentuk keberlanjutan program Sekardadu. Mengenai kendala dalam segi penganggaran yang mana belum ada anggaran khusus terkait konsumsi untuk peserta pelatihan atau sosialisasi, peneliti menyarankan agar para implementor program mendiskusikan terkait penyusunan SPJ tanpa menggunakan tanda tangan/absensi peserta, bisa dimulai dengan membuat laporan konsumsi dengan rincian jumlah peserta yang hadir, jenis konsumsi dengan perkiraan jumlah yang diperlukan, perkiraan biaya, serta dokumen pendukung sebagai bukti pengeluaran seperti kuitansi, faktur, dan bon. Namun meskipun tanpa tanda tangan sertakan bukti kehadiran dengan minta peserta untuk mengisi formulir kehadiran secara sukarela, selanjutnya jelaskan alasan tidak ada tanda tangan atau absensi dalam SPJ tersebut. Lalu segeralah buat proposal pengajuan anggaran ke bupati.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Tim Penerbit Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi 2)*. Bandung: Alfabeta.
- Anderson, James E. 1990. *Public Policymaking: An introduction*. Boston: Houghton Mifflin.
- Aryono, Suryono. 1985. *Kamus Antropologi*. Jakarta: Persindo.
- Gunawan, Asropin, dan Muhammad Farid Ma'ruf. (2020). "Collaborative Governance dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya)". *Publika*, 8(2), 1–10.
- Hasibuan, S.P.M. 2011. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta : CV. Haji Masagung
- Heryan, A.(2021). *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*.
- Huberman, M. & S. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Ipan, dkk. (2021). "Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting". *Ekonomi Dan Bisnis*, 18(3), 383–391.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/33/KEP/429.011/2022 Tentang Tim Koordinasi Kegiatan Dan Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Rawat Daerah Aliran Sungai Di Banyuwangi (Sekardadu) 2022.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. (2011). *Manajemen Pendidikan Karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Purwanto, Heri. 1998. *Pengantar Perilaku Manusia*. Jakarta: EGC.
- Setia. Rahayu Hartiwi. (2015). Rahayu, Hartiwi Setia. 2015. Pengaruh Tingkat Pendidikan Pedagang Kaki Lima Terhadap Upaya Menjaga Kebersihan

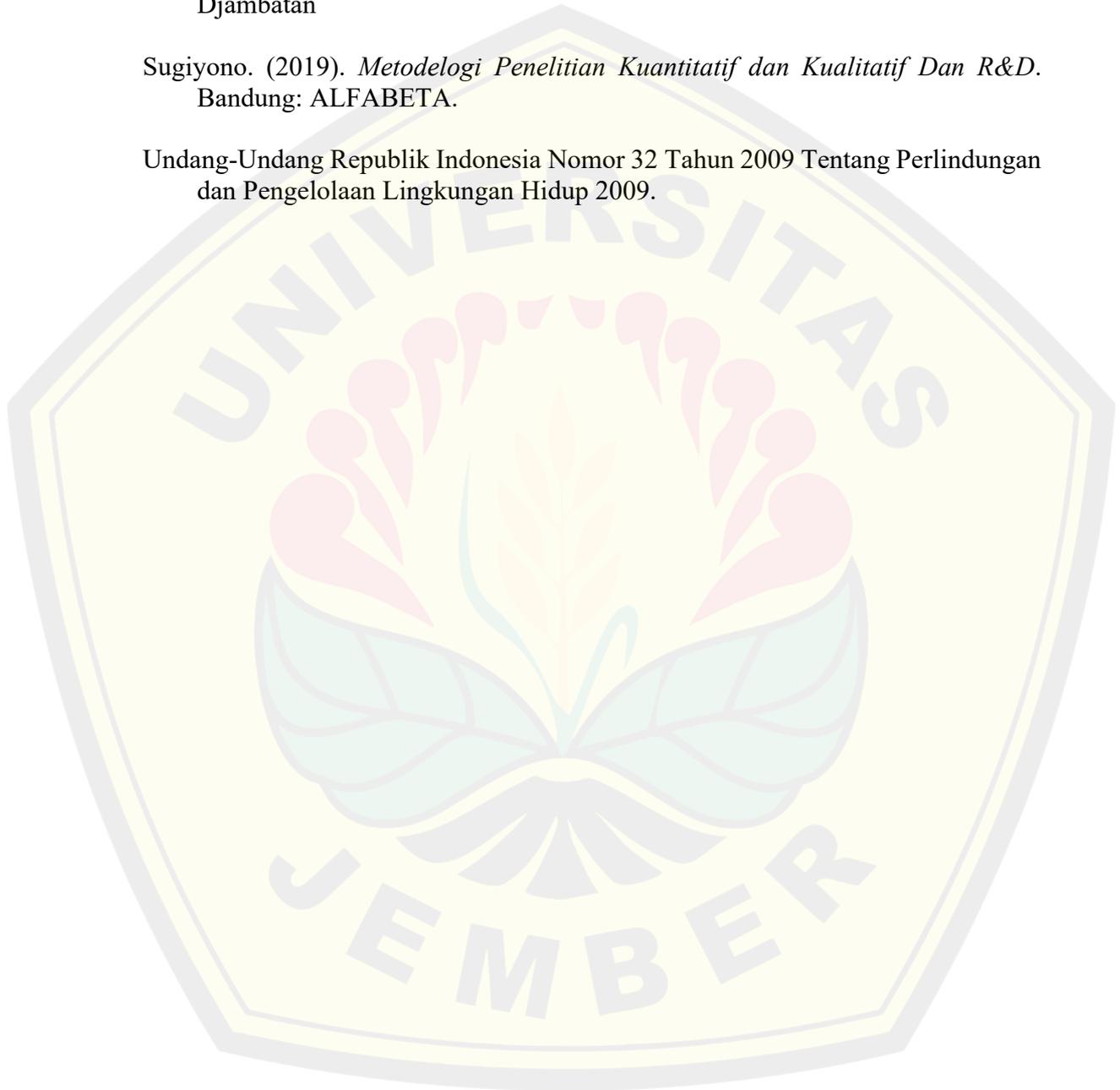
Lingkungan Di Objek Wisata Goa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Skripsi. Semarang:Universitas Negeri Semarang. *Jurnal Pendidikan*, 5.

Soekanto, Soerjono.1993. *Mengenal Sosiologi Hukum*. Bandung.Citra Aditya Bakti

Sugandha, Dann.1991. *Koordinasi Alat Pemersatu Gerakan Administrasi*. Jakarta: Djambatan

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2009.



LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Surat Izin penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
3. Surat Izin penelitian dari LP2M
4. Surat izin penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Surat keterangan bahwa penulis sudah melaksanakan penelitian dari Dinas Pengairan
6. SK Bupati tentang Pelaksanaan Program Sekardadu di Kabupaten Banyuwangi
7. Data dukung surat undangan Dinas Pengairan kepada SKPD terkait pelaksanaan program Sekardadu di Kabupaten Banyuwangi
8. Data dukung dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pengairan Kabupaten Banyuwangi
9. Dokumentasi kegiatan Sekardadu oleh Dinas Pengairan Kabupaten Banyuwangi
10. Dokumentasi penulis ketika melakukan penelitian.

